

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 283 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Disdamkar adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Disdamkar yang selanjutnya disebut Renstra Disdamkar adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Disdamkar yang selanjutnya disebut Renja Disdamkar adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISDAMKAR

Pasal 2

Dokumen Renstra Disdamkar merupakan dokumen perencanaan strategis Disdamkar untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disdamkar yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Disdamkar yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Disdamkar bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdamkar dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disdamkar dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Disdamkar agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Disdamkar;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdamkar;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disdamkar.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISDAMKAR

Pasal 4

(1) Renstra Disdamkar Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Disdamkar dalam menyusun Renja Disdamkar.

(2) Renstra Disdamkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Disdamkar paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Disdamkar; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Disdamkar.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Disdamkar Tahun 2025-2029;
   2. strategi Disdamkar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Disdamkar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Disdamkar; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Disdamkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISDAMKAR

Pasal 5

(1) Disdamkar melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Disdamkar dan evaluasi hasil Renstra Disdamkar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disdamkar terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disdamkar.

(3) Kepala Disdamkar menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disdamkar.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISDAMKAR

Pasal 6

Perubahan Renstra Disdamkar dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Disdamkar mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Disdamkar dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Disdamkar, maka Renstra Disdamkar dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Disdamkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Disdamkar Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Disdamkar terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Disdamkar.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 283

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 283 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan kegiatan manajemen pemerintah dihadapkan dengan situasi dan kondisi lingkungan global yang semakin kompleks yang mengundang konsekuensi adaptasi secara dinamis untuk tetap menempatkan pada posisi pemerintah yang siap secara kompetitif. Maka dalam konteks ini, aplikasi manajemen strategis semakin aktual dijadikan sebagai arah kebijakan yang bersifat srategis. Konsekuensi penerapan manejemen strategis pada organisasi publik membutuhkan perubahan pola pikir dan kerja serta budaya (*mindset*) birokrasi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi publik, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan paradigma birokrasi menjadi suatu alasan yang bersifat mendesak, mengingat perjalanan panjang birokrasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya kerja tradisional serta patologi birokrasi yang menghambat optimalisasi kinerja organisasi publik. Dalam konteks tersebut, penerapan manajemen strategis yang secara aplikatif telah lama digunakan dalam dunia bisnis, mulai diadopsi oleh organisasi publik seiring dengan berkembangnya paradigma *New Public Management*. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan birokrasi, sehingga organisasi publik dapat lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan.

Manajemen strategis secara operasional terutama tahap perencanaan menempatkan unsur pimpinan puncak organisasi berperan penting dan menentukan dalam proses penyusunannya, implemantasi dan evaluasi. Organisasi Pemerintah di daerah, seperti SKPD atau Dinas-dinas daerah menjadi semakin penting dan strategis peran dan fungsi dari Kepala Dinas dalam posisi sebagai unsur pimpinan puncak organisasi dan bertanggunjawab dengan kapasitasnya dalam penyusunan dan implemantasi manajemen kinerja

organisasi. Beratnya tantangan elit daerah tentu tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki daerah dalam mengelola otonomi. Otonomi daerah memiliki banyak dimensi dalam lingkungan yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.

Dinas Daerah memiliki peran strategis dalam membantu Kepala daerah menjelankan visi dan misinya. Di dalam menjalankan peranstrategis tersebut, berpegang kepada Rencana Strategis (Renstra) yang diimplemtasikan selama 5 (lima) tahun sebagai operasionalisasi atau tindakan pencapaian sasaran dan tujuan organiasi masing- masing dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu dinas yang melakukan kajian / telaahan sederhana ini, adalah Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tipelogi A, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan unit kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman, Bidang Penyelamatan, Bidang Sarana, Prasarana dan Informasi, sesuai dengan perubahan nomenklatur / *Type* Dinas tersebut Disdamkar ini memiliki tugas dan fungsi utamanya di dalam Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan salah satu program Pemerintah untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Pengangulangan kebakaran dan Non Kebabaran. Yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar urusan sub urusan kebakaran.

Kondisi kebijakan Perencanaan anggaran dan Kinerja masa periode yang lalu, untuk memenuhi kewajiban dari pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar masih dirasakan kurang dan belum Optimal. Dalam Momentum Penyusunan Rencana Strategis lima tahun kekedepan merupakan hal yang perlu lebih diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Bandung sebagai leading sektor Pemerintah di daerah di dalam mengawal dan membina pelayanan secara efektif dan efisien urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran sesuao amanat Pemertndagri 114 tahun 2018 tentang Penerapan SPM urusan kebakaran. Sebagai suatu dokumen tertulis yang berfungsi sebagai *Blue Print* Organisasi dinas, akan terlihat di dalam RPJMD, RKPD dan Renstra yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselarasi dan mendorong pembangunan sesuai bidangnya.

Secara administratif Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja selama 5 (lima) tahun.

Kajian / Telaahan ini bertolak berdasarkan dari RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bandung, maka pertanyaan masalah berdasarkan hasil pengamatan empirik, sejumlah pertanyaan yang nantinya akan dicoba dijawab dalam penelitian ini antara lain:

(1) Proses penyusunan Renstra sudah mengakomodasi seluruh pegawai di lingkungan Disdamkar ,
(2) Proses penyusunan melibatkan Pimpinan puncak organisasi dan unsur pimpinan dibawahnya.

Perumusan masalah Kajian / telaahan ini adalah, sejauhmana perumusan Rencana Strategis (Renstra) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Bandung melibatkan peran aktif seluruh pegawai dan pimpinan serta unsur pimpinan sehingga menjadi dokumen penting yang dijadikan pedoman kerja dalam kurun waktu 5 Tahun (2025- 2029) Tujuan Kajian / Telaahan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan serta mengkritisi telaah proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Bandung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Disdamkar Periode 2025-2029 terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 82 Tahun 2023 tentang kedudukan dan Susunan perangkat daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan peraturan bupati nomor 90 tahun 2024 tentang perubahan kelima atas peraturan bupati nomor 82 tahun 2023 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah peraturan bupati nomor 106 tahun tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Disdamkar adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Disdamkar beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Disdamkar secara konsisten,sinergis dan akuntabel yang selanjutnya diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabuapaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Disdamkar Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdamkar Kabupaten bandung;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdamkar Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada bagan berikut ini Renstra Disdamkar Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Disdamkar, Kinerja Pelayanan Disdamkar, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan Disdamkar dan Isu Strategis

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Disdamkar serta Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Disdamkar

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif serta Target IKU Disdamkar

BAB V : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISDAMKAR KABUPATEN BANDUNG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung merupakan SOTK mandiri baru dari yang sebelumnya, dengan perubahan signifikan dari status UPTD meningkat berubah menjadi status DINAS. Hal ini menandakan hal positif Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjawab tantangan kedepan di mana Kabupaten Bandung dengan sungguh – sungguh ingin menyediakan pelayanan prima bagi perlindungan warga masyarakatnya dari ancaman bahaya kebakaran, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan dan pengendalian kebakaran, Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan kondisi darurat lainnya, Pemberdayaan masyarakat dalam patisipasi upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran, serta penanganan barang beracun berbahaya (yang dikenal dengan tugas Panca Dharma Pemadam Kebakaran).

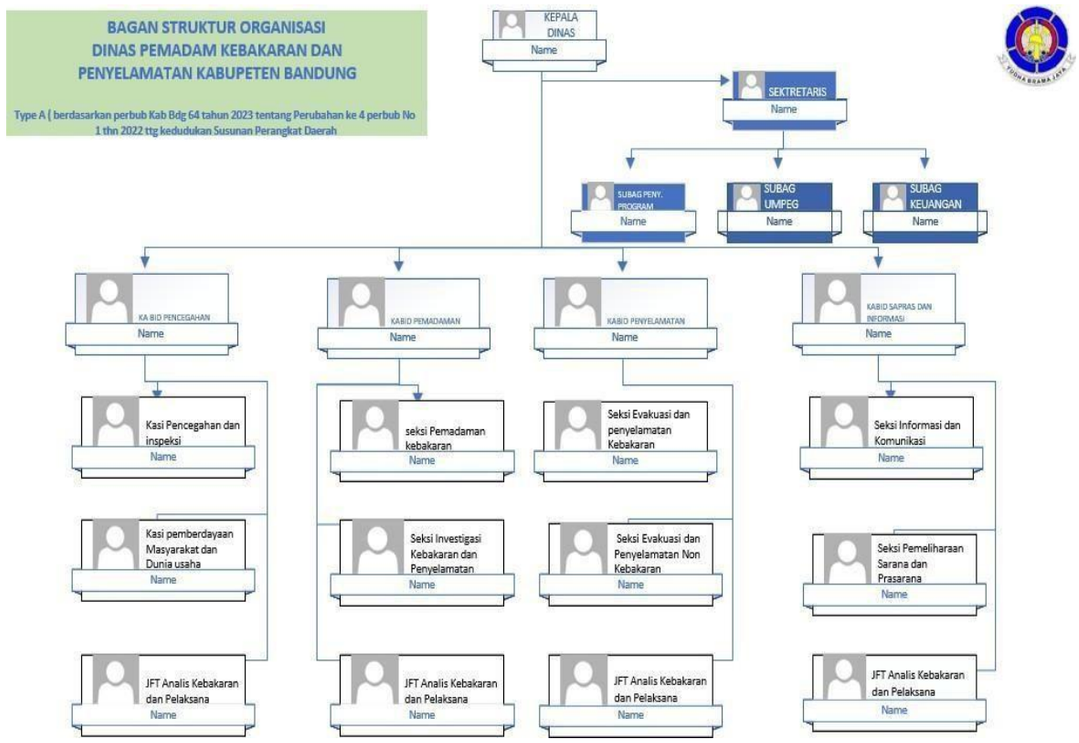
Salah satu pengembangan mutu layanan yang telah dilakukan melalui studi mengenai Konsep Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang berdasarkan pada RISPK Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendekatkan (mendistribusikan) pusat- pusat layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung tersebar lebih merata menjangkau wilayah cakupan kerja kedalam satuan- satuan wilayah imajiner (konseptual) yang lebih kecil yang disebut WMK, dimana batas-batas wilayah WMK ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pasokan air untuk memadamkan kebakaran. Dengan kata lain, WMK adalah sebuah wilayah imajiner yang membagi- bagi sebuah wilayah perkotaan/daerah dengan karakteristik besarnya kebutuhan pasokan air pemadam yang sama. Selanjutnya, WMK-WMK tersebut akan dilayani oleh Pos-Pos pemadam kebakaran yang mampu menghantarkan rantai pasokan air sesuai tingkat resiko WMK- nya kebangunan yang terbakar untuk memadamkan. Untuk dapat menghantarkan air dalam jumlah yang tepat, dalam waktu yang singkat, dan secara efisien (dengan biaya efektif) diperlukan pendistribusian Pos-Pos Pemadam Kebakaran yang dapat mengcover seluruh wilayah dalam waktu respon yang telah ditentukan (maksimum 15 menit). Dengan demikian satu WMK bisa dilayani satu Pos Damkar atau lebih dari satu Pos Damkar. Upaya lain untuk penanggulangan pemadam kebakaran melibatkan partisipasi Masyarakat dengan di bentuknya relawan kebakaran disetiap desa sehingga terwujud Sistem Ketahanan Kebakaran lingkungan (SKKL).

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12. Tahun 2023 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, sebaga berikut:

1. Ka Disdamkar
2. Sekretaris
    - 2.1 Subag Umpeg
    - 2.2 Subag Program
    - 2.3. Subag Keuangan
3. Bidang Pemadaman
    - 3.1. seksi Pemadaman kebakaran
    - 3.2. Seksi Investigasi dan Penyelamatan
    - 3.3. Jafung Analis kebakaran dan Pelaksana
4. Bidang Pencegahan
    - 4.1. Kasi Pencegahan dan inspeksi
    - 4.2. Kasi Pemberdayaan Masy dan Dunia Usaha
    - 4.3. JFT Analis Kebakaran dan Pelaksana
5. Bidang Penyelamatan
    - 5.1. Seksi Evakuasi dan penyelamatan Kebakaran
    - 5.2. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Non Kebakaran
    - 5.3. Jafung Analis Kebakaran dan Pelaksana
6. Bidang Sarana, Prasaran dan Informasi
    - 6.1. Seksi Informasi dan Komunikasi
    - 6.2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
    - 6.3. Jafung Analis Kebakaran dan Pelaksana

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



Sumber : Lakip Disdamkar Kab.Bandung, 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

1. Kepala Dinas

1) Disdamkar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,mengkoordinasikandan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas mempunyai sub tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman, Bidang Penyelamatan, Bidang Sarana, Prasarana dan Informasi, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Dinas;

b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen- dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

e. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;

f. mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;

h. membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;

i. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

l. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas melaksanakan program:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah; dan

b. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

7) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Dinas menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Disdamkar.

8) Kepala Dinas, membawahkan:

a. Sekretariat;

b. Bidang Pencegahan;

c. Bidang Pemadaman;

d. Bidang Penyelamatan;

e. Bidang Sarana Prasarana dan Informasi; dan

f. Jabatan Fungsional.

9) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Dinas dapat melimpahkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Sekretariat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman, Bidang Penyelamatan, dan Bidang Sarana, Prasarana dan Informasi.

10) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Yaitu Permenpan RB No. 16 Tentang Jabatan Fungsional Pemadam kebakaran dan Permenpan RB no 17 tentang jabatan Analis Kebakaran, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional

berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Ada 2 Jenis Jabatan Fungsional, yaitu :

11) Jabatan Fungsional Pemadam kebakaran, terdiri dari tingkatan:

a. Pemadam Pemula
b. Pemadam Terampil
c. Pemadam Mahir
d. Pemadam Penyelia:

12) Jabatan Fungisonal Analis Kebakaran, terdiri dari :

a. Analis Kebakaran Ahli Muda
b. Analis kebakaran Tingkat Ahli Madya
c. Analis Kebakaran Tingkat Tinggi Pratama

Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Per Januari 2025 sebanyak 83 orang ASN Terdiri 59 ASN, 24 PPPK dan 72 Orang Non PNS, seperti dalam table berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	L	P	Keterangan
1	JUMLAH ASN	83 Orang	79	4	ASN/PNS
	Jabatan Struktural	17 Orang	16	1	
	- Eselon II	1 Orang	1	0	Kepala Dinas
	- Eselon III a	1 Orang	1	0	Sekretaris
	- Eselon III b	4 Orang	4	0	4 Kepala Bidang
	- Eselon IV / a	11 Orang	10	2	3 Sub Bag, 8 Kasi
	Jabatan Fungsional	66 Orang			
	- Analis Kebakaran	3 Orang	2	1	PPPK
	- Pemadam Kebakaran	21 Orang	21	0	Pasukan Pemadam
	Jabatan Fungsional Umum	42 Orang	40	2	Petugas Administrasi
2	JUMLAH Non ASN	72 Orang	72	0	PHL dan TA
	TOTAL PEGAWAI	155	149	6	

Sumber : Data Kepegawaian Disdamkar, 2025

Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor di Kantor Pemadam Kebakaran Kab Bandung, Soreang. Selain itu juga memiliki eksisting 9 Pos Damkar, yaitu :

1. Pos Damkar Soreang
2. Pos Damkar Ciparay
3. Pos Damkar Cicalengka
4. Pos Damkar TKI
5. Pos Damkar Pacira
6. Pos Damkar Majalaya
7. Pos Damkar Cileunyi
8. Pos Damkar Baleendah
9. Pos Damkar Pangalengan

Ditambah ada 84 Pos Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran) di 84 desa 31 Kecamatan dengan jumlah anggota relawan kebakaramn 1103 anggota redkar.

2. Sumber Daya Peralatan dan Mesin

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, saat ini sumberdaya yang tersedia adalah Mobil Pemadam kebakaran yang dimiliki berjumlah 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 Mobil pancar yang rusak berat, 2 Unit Mobil *Rescue*, 1 unit mobil komando, 2 Unit Mobil *Suply Air* dan 2 Unit Motor Roda 3 yang tersebar di 9 Pos damkar.Jumlah ideal armada pemadam kebakaran sesuai dengan standar Asia yaitu setiap satu mobil pemadam kebakaran mampu melayani 10.000 penduduk. Jika standard ini yang digunakan, maka diperlukan sekitar345 unit mobil. Atau dapat digunakan pendekatan jumlah mobil berdasarkan hasil kajian RISP Kabupaten Bandung (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) yang telah ada yang salah satu isinya bahwa di wilayah Kabupaten Bandung dibentuk 11 WMK, dimana dalam 1 WMK rata-rata dibentuk 2–4 Pos Damkar, sehingga kebutuhan Pos Damkar adalah sekitar 31 Pos Damkar dengan jumlah Mobil Damkar per Pos Damkar adalah 2 Mobil, maka total kebutuhan armada mobil pemadam kebakaran adalah sejumlah 62 Mobil. Adapun kondisi existing personil petugas Damkar yang disiagakan sebanyak 153 anggota.

Daftar inventaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. :

Tabel 2.2 Daftar Inventaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Meja Tulis	-	Buah
2	Meja kerja staf	4	Buah
3	Meja ½ biro	8	Buah
4	Meja rapat	2	Unit
5	meja biro eselon III dan II	6	Buah
6	Kursi Biasa	6	Buah
7	Kursi Putar	-	Buah
8	Kursi Lipat	-	Buah
9	Kursi Kayu	-	Buah

No	Uraian	Jumlah	Satuan
10	Kursi Tamu	-	Set
11	Kursi Kuliah	30	Buah
12	Kursi kerja staf	-	Buah
13	Brand Kas	-	Buah
14	Lemari Kaca	4	Buah
15	Lemari Kayu	30	Buah
16	Lemari Besi	4	Buah
17	Lemari Peta	-	Buah
18	Lemari arsip	-	buah
19	Meja Gambar	-	Buah
20	Meja komputer	-	Buah
21	Komputer CPU	2	Buah
22	Monitor	2	Buah
23	Printer	1	Buah
24	Filling Kabinet	1	Buah
25	filling arsip		Buah
26	Elektronic White Board	-	Buah
27	Papan Pengumuman		Buah
28	Wirelles	1	Buah
29	Kamera Digital	-	Buah
30	Mesin Fascimile	-	Buah
31	Multi Media Proyektor	1	Buah
32	Mesin Tik	2	Buah
33	Lap Top	12	Buah
34	Note book	1	Buah
35	Desktop	24	Buah
36	LAN	1	Buah

Sumber : Data Aset Disdamkar, 2025

Untuk menunjang operasional kegiatan, Dinas Pemadam KebakarandanPenyelamatanKabupaten Bandung memiliki alat dan kendaraan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Daftar Inventaris Kendaraan

No	Uraian	Jumlah	
1.	Mobil Pompa Pemadam Kebakaran	15	Buah
2.	Mobil Komando	2	Buah
3.	Mobil Tangki/suplay air	2	Buah
4.	Mobil Pick UP	1	Buah
5.	Mobil Rescue	2	Buah
6.	Motor pemadam	2	Buah
7.	Motor Roda 3	2	Buah
8.	Sepeda Motor	13	Buah
9.	Kendaraan Dinas /opreasional	4	Buah

Sumber : Data Aset Disdamkar, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.1.3.1 Data-data dan Informasi Terkait Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kinerja pelayanan PD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan yaitu urusan wajib pelayanan Dasar (IKK) sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membidangi urusan wajib pelayanan dasar dengan indikator kinerja kunci (IKK) dengan rumusan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Bidang urusan / Indikator	Rumus
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1.1	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran /Luas wilayah kabupaten/kotax100%
1.2	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani Dalam waktu maksimal 15 menit/Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%

Sumber : Disdamkar, 2025

Direncanakan penetapan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk Jangka Panjang 1 Pos 1 kecamatan sehingga jumlah pos menjadi 31 Pos Damkar

- Ada 1 WMK yang terdiri dari 1 Pos Damkar
- Ada 1 WWK yang terdiri dari 2 atau 3 Pos Damkar

Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor di Kantor Pemadam Kebakaran Kab Bandung, Soreang. Selain itu juga memiliki existing 9 Pos Damkar, yaitu :

1. Pos Damkar Soreang
2. Pos Damkar Ciparay
3. Pos Damkar Cicalengka
4. Pos Damkar TKI
5. Pos Damkar Pacira
6. Pos Damkar Majalaya
7. Pos Damkar Cileunyi
8. Pos Damkar Baleendah
9. Pos Damkar Pangalengan

Gambar 2.2 Lokasi Pos/Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)



Sumber: Disdamkar, 2025

Rencana Pengambangan Pos damkar sesuai ketentuan akan dibangun di setiap kecamatan, pengembangannya dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, untuk rencana strategis 2025-2029 di prioritaskan pembangunan pos di wilayah :

1. Pos wilayah Cimenyan
2. Pos Wilayah Kertasari/Pacet
3. Pos Wilayah Cilengkrang
4. Pos Wilayah Pameungpek
5. Pos Wilayah Bojongsoang
6. Pos Wilayah Ibun

Pengembangan Pos di wilayah tersebut sangat *urgent* dibangun untuk mengoptimalkan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai dengan *response time* 15 menit, Kinerja Pelayanan PD pengampu SPM sub urusan Kebakaran Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran Berdasarkan Permendagri 114 tahun 2028 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran kabupaten/ Kota, dengan jenis “layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran” (pasal 2) dengan mutu jenis layanan (Pasal 3) sebagai berikut:

a. Layanan respons cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Dari evaluasi hasil Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil pengukuran / capaian kinerja yang mengevaluasi dan menganalisis indikator kinerja utama (IKU) 2021-2024 dapat disimpulkan dalam analisis penyebab keberhasilan / kegagalan (peningkatan /penurunan) kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah hal kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di setiap tahunnya yang dijadikan acuan perencanaan tahun-tahun yang akan datang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021-2024 merupakan laporan tahun ke tiga dari dokumen RPJMD/Renstra 2021-2026 pada masa jabatan Kepala Daerah periode 2021- 2026. Dalam rangka menjalanjakan Visi Misi Bupati Bandung yang perlu diukur tingkat capaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra dan RKPD/Renja perangkat daerah tahun 2024.

Dalam Pelaksanaan pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 8 indikator yang telah ditetapkan dan Indikator Kinerja Kunci 2021-2024 mengalami fluktuasi capaian target kinerja, adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan capaian *response time* terhadap kejadian kebakaran dalam waktu 15 menit dari target renstra capaian terakhir belum mencapai 100% sebagaimana daftar berikut :

Tabel 2.5 Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target					Realisasi					Rasio Ketercapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase Capaian Tingkat Waktu tanggap (*respontime*) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	100%	100%	N/ a	60%	65%	80%	85%	90%	60%	66%	85.49%	82.27%	83%	100%	102%	107%	97	92%
2	Prosentase Nilai aset (harta benda) yang dapat disela mat kan akibat kejadian kebakaran	N/ a	N/a	N/ a	60%	65%	86%	87%	87%	42.24%	65%	90%	80.39%	73.27%	70%	100%	104%	92%	84%
3	Prosentase jumlah kejadian kebak aran yang tidak menimbulkankorban jiwa	N/ a	N/a	N/ a	95%	95%	95%	96%	98%	97.80%	97.80%	99.45%	99.98%	100%	103%	103%	105%	104%	102%
4	Prosentase jumlah gedung dan bangunan yang terproteksi dari kebakaran	N/ a	N/a	N/ a	10%	25%	35%	40%	45%	10%	25%	28%	35%	40%	100%	100%	80%	88%	89%
5	Jumlah desa yang telah Relawan Kebakaran	N/ a	N/a	N/ a	16	25	60	70	75	10	25	12	27	24	63%	100%	20%	39%	32%
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/ a	N/a	N/ a	77	78.2	79	80	81	70	72	79.45	80.7	81	91%	92%	101%	101%	100%
7	Prosentase Asset dalam Kondsi Baik	N/ a	N/a	N/ a	95%	96%	97%	98%	98%	94.95%	97%	97.56%	97.56%	97.56%	100%	101%	101%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target					Realisasi					Rasio Ketercapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	NilaiRata- Rata SKP	N/ a	N/a	N/ a	95.28	96	97	98	98	97	97	98	98	98	102%	101%	101%	100%	100%

Sumber : Disdamkar, 2025

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian SPM Tahun 2021-2024

Selain melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan setiap sasaran yang telah ditetapkan, penilaian juga mencakup capaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di urusan bencana/kebakaran.

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian pelayanan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024, berikut dengan target kinerja, alokasi anggaran, serta realisasi pencapaiannya, dapat disampaikan sebagaimana uraian berikut:

Tabel 2.6 Evaluasi Kinerja Penerapan SPM Sub Urusan kebakaran Tahun 2021-2024

NO	JENIS LAYANAN	Satuan	Jumlah Total Yang harus dilayani				Jumlah Total Yang terlayani				Capaian			
1			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
A	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran (DAMKAR) Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	200	200	200	200	282	222	651	436	100%	100%	100%	100%
B	Presentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%) Jumlah Mutu Barang/ Jasa /SPM													
1	Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi laporan samapi tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	layanan	282	222	651	436	272	192	568	258	96%	86%	87%	82%
2	Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi	SOP	15	21	21	21	15	20	21	21	100%	95%	100%	100%
3	Sarana dan Prasana Pemadam kebakaran (Pos damkar, Mobil Pemadam, ApD dll..	jenis	45	45	45	45	45	38	44	45	100%	84%	98%	100%
4	Kapasitas Paratur Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ SDM bersertifikat	Orang	147	147	147	147	147	125	125	147	100%	85%	85%	100%
5	Pelaksanaan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	200	200	200	200	200	222	651	436	100%	111%	326%	218%
6	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi wbagi warga negara yang terdampak kebakaran	orang	200	200	200	200	200	222	651	436	100%	111%	326%	218%

Sumber : Disdamkar, 2025

Tahapan Penerapan SPM sub urusan ini dilakukan dengan Tahapan :

a. Pengumpulan data, Data yang terkait dalam tahapan ini adalah data dukung pelaksanaan SPM yang terkait struktur organisasi, jumlah penduduk, Alokasi anggaran, data kejadian, data warga yang menjadi korban kebakaran dan data relawan kebakaran

b. Perhitungan Kebutuhan Biaya, Perhitungan Kebutuhan Biaya pemenuhan layanan dasar sesuai dengan 5 jenis mutu layanan yaitu perhitungan Biaya layanan *Response time* penganggulangan kebakaran 15 menit, Perhitungan Biaya Layanan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran kabupaten, Perhitungan biaya layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi, perhitungan biaya pemberdayaan masyarakat/ Relawan Pemadam kebakaran dan Perhitungan Biaya untuk layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi.

c. Pemenuhan Rencana Pemenuhan dasar, Rumusan rencana ini pada tahap perhitungan kebutuhan untuk 5 mutu layanan tersebut kedalam rumusan strategis yang direncanakan dan diprogramkan dalam RPJMD, RKPD Renstra dan Renja PD hal ini untuk menjamin bahwa penerapan layanan urusan wajib pelayan dasar sub urusan kebakaran dapat terwujud sesuai dengan amanat undang-undang.

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, tahap ini adalah pelaksanaan yang telah disusun, dihitung dan dijadwalkan sesuai dengan ketentuan sebagai indikator bahwa urusan wajib pelayanan dasar ini terlaksana dengan baik.

Realisasi Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran dengan indikator pencapaian adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target capaian 100% Berdasarkan data dari dokumen laporan kejadian kebakaran tahun 2024 terdapat 436 kejadian kebakaran di Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung. Dari 436 kejadian yang dapat ditangani dengan *response time* 15 menit sejumlah 285 kejadian atau 65,37%, dengan demikian terdapat kejadian kebakaran yang penanganannya melebihi *response time* 15 menit yaitu sejumlah 151 kejadian atau 34,63 %. Hal ini tidak sesuai dengan capaian target yang dilaporkan e-SPM, karena penetapan target pada e-SPM tahun 2024 adalah 200 layanan dengan realisasi tahun 2024 adalah 285 layanan atau 100 %. rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7 Realisasi Kinerja SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021-2024

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Poin	78.20	79.00	80.00	81.00	79.00	79.45	80.70	81.25	101%	101%	101%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	3	3	3	3	3	2	3	3	100%	67%	100%	100%
c	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	-	-	0	0	-	-				
d	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0	-	-	0	0	-	-				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya - Persentase laporan pertanggungjawaban	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
		keuangan sesuai ketentuan													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Set	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Bulan	12	12	12	12	12	7	12	12	100%	58%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
		Disediakan													
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah	HOK	180	180	180	180	180	165	180	180	100%	92%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan)	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Unit	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (*response time)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) - Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran	Persen	75	80	85	90	80	86	87	83	107%	108%	103%	92%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus kebakaran di WMK dengan capaian *response time* maksimal 15 menit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Managemen Kebakaran dan Jumlah Pos Damkar	Unit	1	2	1	2	1	2	1	2	100%	100%	100%	100%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan pemadaman kebakaran dalam persentase tingkat respond time	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan B3 (bahan berbahaya beracun)	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sapras dan APD untuk pencegahan dan penggulangan kebakaran	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Prosentase cakupan layanan komukasi dan informasi kebakaran dan penyalamatan diwilayah desa/kel kab Bandung	Persen	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kerjama antar wilayah kabupaten/kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan/gedung yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran	Persen	25	30	35	40	14	28	35	40	56%	93%	100%	100%
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah bangunan/gedung yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Unit	1000	100	2	1	1,000	140	2	1	100%	140%	100%	100%
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Unit	100	100	2	1	100	149	2	1	100%	149%	100%	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Persen	25	30	35	40	23	19.37	30.26	40	92%	65%	86%	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	jumlah SKKL yang terbentuk	Desa	21	21	35	60	12	12	27	24	57%	57%	77%	40%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran	Orang	100	2214	366	4,067	100	2,268	366	4,067	100%	102%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	jumlah relawan pemadam kebakaran yang terbentuk	Desa	10	12	27	24	10	12	27	24	100%	100%	100%	100%
	Dukungan Pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan saran dan prasarana	jumlah dukungan sarpras untuk relawan pemadam kebakaran		-	-	10	18	-	-	-	18			0%	100%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-persentase pelayanan pencarian dan pertolongan yang tidak menimbulkan korban	Persen	95	95	96	98	99.51	100	99.93	100	105%	105%	104%	102%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras yang terstandarisasi untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	6	12	15	15	6	12	15	15	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	6	12	15	12	6	12	15	12	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Bidang Disdamkar, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian target sudah mencapai 100 % bahkan capaian target layanan melebihi target layanan yang ditetapkan. Namun bila dilakukan analisa perbandingan pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan SPM sub bidang Kebakaran, masih terdapat kelemahan permasalahan dalam pencapiannya. Dalam Penerapan Pelayanan Sub Urusan Kebakaran. (SPM) Permendagri No 114 tahun 2018 Dengan Tujuan dan sasaran "Tersedianya layanan dasar sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria" Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran yang dengan jenis indikator layanan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jenis Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Bandung

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Indikator Jenis Layanan	Target	Keterangan
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamata n dan Evakuasi Kebakaran	100 %	1. Layanan responcepat (*Response Time*) penanggulangan Kejadian Kebakaran 2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	100 %	Penerima Pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi Korban Kebakaran atau terdampak Kebakaran
				3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi	100%	
				4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Rel awan Kebakaran dan	100%	
				5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	100%	

Sumber : Disdamkar 2025

Tabel 2.9 Rekomendasi Perbaikan Untuk Pelaksanaan SPM Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar Dasar	Permasalahan Jenis Pelayanan Dasar Trantibum linmas sub urusan kebakaran
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Pemenuhan mutu layanan disebabkan oleh sarana dan Prsarana terutama sebaran Pos yang baru tersedia 9 Pos damkar yang dibutuhan minimal 15 Pos damkar; 2. Dari 9 pos damkar hanya ada 3 pos damkar eksisting merupakan pos mandiri damkar sedangkan 6 pos lainnya masih menggunakan fasilitas kecamatan; 3. Kendaraan damkar baru tersedia 12 Unit yang mana kebutuhan untuk 1 pos minimal harus tersedia 2 unit kendaran dari rencana penyediaan kendaraan 30 unit; 4. Adanya permasalahan jumlah SDM di Disdamkar yang masih minim di mana saat ini jumlah eksistingnya sekitar 30% (104 orang) dari 300 yang dibutuhkan; 5. Pola kerja tidak sesuai standar (*over time*) jam kerja; 6. Relawan kebakaran baru terbentuk di 84 desa dari 270 desa; 7. Belum terintegrasinya sistem pelaporan kejadian kebakaran yang dilakukan oleh relawan; 8. Adanya kesulitan dalam proses pembangunan pos yang harus dikordinasikan dengan instansi yang lain; 9. Terbatasnya akses informasi dalam melaporkan potensi kejadian kebakaran oleh masyarakat; 10. Belum disusun rencana aksi SPM sub urusan kebakaran 11. Belum disusun SOP terkait urusan kebakaran; 12. Terdapat 45 jenis sarana prasarana penanganan kebakaran yang belum terpenuhi di mana yang baru terpenuhi sekitar 38 jenis sarana prasarana; 13. Alokasi anggaran belum optimal untuk pengadaan jenis sarpras untuk urusan kebakaran; 14. Sesuai perhitungan Anjab ABK kebutuhan Pegawai yang belum terpenuhi (minimal ada 300 orang anggota pasukan) 15. Masih minimnya kapasitas aparatur yang berkompetensi sesuai dengan standar yang diperlukan; 16. Alokasi dari BKPSDM untuk peningkatan kapasitas aparatur pasukan damkar belum tersedia; 17. Alokasi Anggaran Untuk Diklat relatif terbatas; 18. Masih kurangnya tenaga penyelamatan; 19. Sarana dan prasarana penyelamatan masih minim dimana kebutuhan ada 9 unit namun eksisting baru ada 1 unit.

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Data dan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 pada Sub Urusan Kebakaran, yang mencakup dua program yaitu program penunjang urusan serta program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menunjukkan bahwa dalam periode lima tahun dialokasikan anggaran dengan rata-rata sekitar 17 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, tingkat realisasi anggaran mencapai rata-rata 82,53%, dengan rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun ke tahun berada pada kisaran rata-rata 87,65%. Evaluasi capaian dan Kinerja Disdamkar 2021-2024 sebagai berikxut:

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Disdamkar 2021-2024

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Poin	78.20	79.00	80.00	81.00	79.00	79.45	80.70	81.25	101%	101%	101%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	3	3	3	3	3	2	3	3	100%	67%	100%	100%
c	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	-	-	0	0	-	-				
d	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0	-	-	0	0	-	-				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya - Persentase laporan pertanggungjawaban	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
		keuangan sesuai ketentuan													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Set	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Bulan	12	12	12	12	12	7	12	12	100%	58%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
		Disediakan													
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah	HOK	180	180	180	180	180	165	180	180	100%	92%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan)	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Unit	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (*response time)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) - Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran	Persen	75	80	85	90	80	86	87	83	107%	108%	103%	92%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus kebakaran di WMK dengan capaian *response time* maksimal 15 menit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Managemen Kebakaran dan Jumlah Pos Damkar	Unit	1	2	1	2	1	2	1	2	100%	100%	100%	100%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan pemadaman kebakaran dalam persentase tingkat respond time	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan B3 (bahan berbahaya beracun)	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sapras dan APD untuk pencegahan dan penggulangan kebakaran	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Prosentase cakupan layanan komukasi dan informasi kebakaran dan penyalamatan diwilayah desa/kel kab Bandung	Persen	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kerjama antar wilayah kabupaten/kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan/gedung yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran	Persen	25	30	35	40	14	28	35	40	56%	93%	100%	100%
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah bangunan/gedung yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Unit	1000	100	2	1	1,000	140	2	1	100%	140%	100%	100%
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Unit	100	100	2	1	100	149	2	1	100%	149%	100%	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Persen	25	30	35	40	23	19.37	30.26	40	92%	65%	86%	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	jumlah SKKL yang terbentuk	Desa	21	21	35	60	12	12	27	24	57%	57%	77%	40%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran	Orang	100	2214	366	4,067	100	2,268	366	4,067	100%	102%	100%	100%

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja %			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2			6	7	5	6	11	12	10	11	13	14	15	16
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	jumlah relawan pemadam kebakaran yang terbentuk	Desa	10	12	27	24	10	12	27	24	100%	100%	100%	100%
	Dukungan Pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan saran dan prasarana	jumlah dukungan sarpras untuk relawan pemadam kebakaran		-	-	10	18	-	-	-	18			0%	100%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-persentase pelayanan pencarian dan pertolongan yang tidak menimbulkan korban	Persen	95	95	96	98	99.51	100	99.93	100	105%	105%	104%	102%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras yang terstandarisasi untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	6	12	15	15	6	12	15	15	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	6	12	15	12	6	12	15	12	100%	100%	100%	100%

Sumber : Disdamkar, 2024

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2021-2025

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke					Rata Rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 per agustus	2021	2022	2023	2024	2025	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.713.071.281	15.985.581.541	15.137.364.589	18.284.565.376	20.212.207.989	13.369.460.563	14.808.332.582	14.774.951.802	16.256.275.042	11.930.759.567	71,44%	92,64%	97,61%	88,91%	59,03%	17.666.558.155	14.227.955.911
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.979.446.281	15.890.581.541	15.056.864.589	18.213.241.782	20.096.096.085	13.324.987.563	14.718.442.582	14.694.641.802	16.187.930.042	11.913.734.567	88,96%	92,62%	97,59%	88,88%	59,28%	16.847.246.056	14.167.947.311
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	95.000.000	80.500.000	71.323.594	116.111.904	44.473.000	89.890.000	80.310.000	68.345.000	17.025.000	98,83%	94,62%	99,76%	95,82%	14,66%	81.587.100	60.008.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	45.000.000	34.500.000	32.940.194	14.425.000,00	14.933.000	39.890.000	34.310.000	30.345.000	8.375.000	99,55%	88,64%	99,45%	92,12%	58,06%	28.373.039	25.570.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	14.935.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.950.000	99,57%	100,00%	100,00%	100,00%	49,50%	11.000.000	9.977.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	40.000.000	36.000.000	28.383.400	12.928.404,00	14.605.000	40.000.000	36.000.000	28.000.000	3.700.000	97,37%	100,00%	100,00%	98,65%	28,62%	26.462.361	24.461.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					68.758.500,00					39.840.000							
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					10.000.000,00					-							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.823.294.281	11.353.649.991	10.268.501.364	14.232.977.388	16.257.546.913	9.390.520.704	10.266.827.024	10.049.231.389	12.409.321.175	9.779.638.877	86,76%	90,43%	97,86%	87,19%	60,15%	12.587.193.987	10.379.107.834

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke					Rata Rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 per agustus	2021	2022	2023	2024	2025	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.794.944.281	11.333.649.991	10.248.501.364	14.212.977.388	16.247.546.913,00	9.362.275.704	10.246.827.024	10.029.231.389	12.390.008.175	9.777.138.877	86,73%	90,41%	97,86%	87,17%	60,18%	12.567.523.987	10.361.096.234
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.350.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000,00	18.245.000	10.000.000	10.000.000	9.965.000	2.500.000	99,43%	100,00%	100,00%	99,65%	50,00%	10.670.000	10.142.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.348.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	93,48%	0,00%	9.000.000	7.869.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.002.000	111.502.000	116.184.600	-	-	124.627.360	110.389.500	115.458.000	-	-	99,70%	99,00%	99,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	70.537.720	70.094.972
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125.002.000	111.502.000	116.184.600	-	-	124.627.360	110.389.500	115.458.000	-	-	99,70%	99,00%	99,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	70.537.720	70.094.972
Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.000.000	358.011.020	104.415.400	174.700.000	102.743.000	304.027.388	356.141.574	102.191.211	168.602.014	76.623.883	86,37%	99,48%	97,87%	96,51%	74,58%	218.373.884	201.517.214
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	29.782.600	9.989.900	9.987.973	9.947.514	9.990.056	99,28%	99,90%	99,88%	99,48%	99,90%	14.000.000	13.939.609
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.000.000	283.011.020	33.984.000	100.000.000	-	152.001.690	281.242.700	32.300.000	96.700.000	-	98,07%	99,38%	95,04%	96,70%	#DIV/0!	114.399.004	112.448.878
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.001.500,00	35.848.580	9.986.000	9.950.000	9.930.000	6.500.000	99,58%	99,86%	99,50%	99,30%	43,33%	16.200.300	14.442.916
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	10.000.000	-	10.000.000	6.447.500,00	24.783.000	9.973.200	-	9.978.300	748.800	99,13%	99,73%	#DIV/0!	99,78%	11,61%	10.289.500	9.096.660
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	11.220.000	10.000.000	9.866.000	9.619.200	4.004.000	80,14%	100,00%	98,66%	96,19%	40,04%	10.800.000	8.941.840
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.000.000	35.000.000	40.431.400	34.700.000	61.294.000,00	50.391.518	34.949.774	40.087.238	32.427.000	55.381.027	54,77%	99,86%	99,15%	93,45%	90,35%	52.685.080	42.647.311
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	3.259.150.000	3.649.418.530	3.317.300.025	3.482.698.900	3.325.204.268	3.144.616.079	3.602.116.926	3.271.046.019	3.298.571.452	1.961.513.607	96,49%	98,70%	98,61%	94,71%	58,99%	3.406.754.345	3.055.572.817

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke					Rata Rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 per agustus	2021	2022	2023	2024	2025	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	1.700.000,00	1.500.000	1.650.000	1.690.000	2.000.000	1.600.000	100,00%	97,06%	99,41%	100,00%	94,12%	1.720.000	1.688.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	141.978.000,00	87.014.321	93.396.502	118.291.023	103.569.379	83.327.353	79,10%	71,84%	90,99%	79,67%	58,69%	128.395.600	97.119.716
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.147.650.000	3.517.718.530	3.185.600.025	3.350.698.900	3.181.526.268,00	3.056.101.758	3.507.070.424	3.151.064.996	3.193.002.073	1.876.586.254	97,09%	99,70%	98,92%	95,29%	58,98%	3.276.638.745	2.956.765.101
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.000.000	323.000.000	1.169.963.200	251.541.900	294.490.000	316.723.032	293.077.558	1.076.405.183	243.090.401	78.933.200	84,46%	90,74%	92,00%	96,64%	26,80%	482.799.020	401.645.875
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	196.000.000	196.000.000	167.070.000	209.630.000,00	93.230.700	166.742.888	195.528.768	159.721.900	75.893.200	62,15%	85,07%	99,76%	95,60%	36,20%	183.740.000	138.223.491
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	23.946.932	9.985.000	9.850.000	9.594.600	3.040.000	95,79%	99,85%	98,50%	95,95%	30,40%	13.000.000	11.283.306
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	117.000.000	963.963.200	74.471.900	74.860.000,00	199.545.400	116.349.670	871.026.415	73.773.901	-	99,77%	99,44%	90,36%	99,06%	0,00%	286.059.020	252.139.077
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.733.625.000	5.056.490.830	4.097.732.160	13.905.926.623	7.394.726.698	3.620.461.953	4.712.177.444	4.041.100.325	13.542.103.321	1.690.922.384	96,97%	93,19%	98,62%	97,38%	22,87%	6.837.700.262	5.521.353.085

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke					Rata Rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 per agustus	2021	2022	2023	2024	2025	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.891.585.000	2.694.356.380	2.788.421.010	9.887.679.377	5.557.554.500	2.802.442.607	2.645.290.414	2.759.743.125	9.699.120.800	1.129.693.762	96,92%	98,18%	98,97%	98,09%	20,33%	4.763.919.253	3.807.258.142
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	887.725.000	132.400.000	5.500.000	130.150.000	3.175.500,00	865.796.400	123.694.005	3.625.000	129.649.156	-	97,53%	93,42%	65,91%	99,62%	0,00%	231.790.100	224.552.912
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.638.760.000	1.937.637.380	1.881.360.000	1.306.720.000	1.719.474.000,00	1.577.519.607	1.909.537.196	1.876.614.475	1.296.987.600	780.386.682	96,26%	98,55%	99,75%	99,26%	45,39%	1.696.790.276	1.488.209.112
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	16.492.200	18.309.600	7.000.000,00	19.919.000	14.065.000	13.877.000	18.298.600	3.125.000	99,60%	70,33%	84,14%	99,94%	44,64%	16.360.360	13.856.920
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	295.100.000	554.319.000	757.383.810	8.341.885.000	3.792.073.400,00	293.082.900	550.975.890	741.094.750	8.167.246.244	333.262.080	99,32%	99,40%	97,85%	97,91%	8,79%	2.748.152.242	2.017.132.373
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	30.000.000	30.000.000	112.500.000	75.000.000	28.231.600,00	29.472.200	28.044.323	111.300.900	71.767.400	9.005.000	98,24%	93,48%	98,93%	95,69%	31,90%	55.146.320	49.917.965

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke					Rata Rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 per agustus	2021	2022	2023	2024	2025	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	20.000.000	20.000.000	15.185.000	15.614.777	7.600.000,00	16.652.500	18.974.000	13.231.000	15.171.800	3.915.000	83,26%	94,87%	87,13%	97,16%	51,51%	15.679.955	13.588.860
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	115.000.000	115.000.000	106.784.800	84.835.172	40.100.050	114.799.800	114.889.900	106.784.800	84.704.600	34.639.300	99,83%	99,90%	100,00%	99,85%	86,38%	92.344.004	91.163.680
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	50.000.000	50.000.000	45.500.000	33.065.172	19.450.000,00	49.952.400	49.995.000	45.500.000	32.934.800	13.989.300	99,90%	99,99%	100,00%	99,61%	71,92%	39.603.034	38.474.300
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	65.000.000	65.000.000	61.284.800	51.770.000	20.650.050,00	64.847.400	64.894.900	61.284.800	51.769.800	20.650.000	99,77%	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%	52.740.970	52.689.380
Investigasi Kejadian Kebakaran	35.000.000	35.000.000	25.430.000	28.190.000	12.087.500	31.050.000	34.860.000	25.430.000	28.190.000	10.445.000	88,71%	99,60%	100,00%	100,00%	86,41%	27.141.500	25.995.000
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	35.000.000	35.000.000	25.430.000	28.190.000	12.087.500,00	31.050.000	34.860.000	25.430.000	28.190.000	10.445.000	88,71%	99,60%	100,00%	100,00%	86,41%	27.141.500	25.995.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	400.000.000	1.876.694.450	871.678.350	1.857.485.374	1.173.882.648	399.063.750	1.587.883.130	850.402.400	1.698.958.349	296.327.922	99,77%	84,61%	97,56%	91,47%	25,24%	1.235.948.164	966.527.110

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke					Rata Rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 per agustus	2021	2022	2023	2024	2025	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000	1.110.442.600	156.368.000	984.757.014	455.631.908,00	49.964.500	873.131.100	155.412.700	879.071.358	163.761.100	99,93%	78,63%	99,39%	89,27%	35,94%	551.439.904	424.268.152
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	350.000.000	766.251.850	715.310.350	679.650.000	433.463.460,00	349.099.250	714.752.030	694.989.700	641.457.151	132.566.822	99,74%	93,28%	97,16%	94,38%	30,58%	588.935.132	506.572.991
Dukungan Pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan saran dan prasarana	-	-	-	193.078.360	284.787.280,00	-	-	-	178.429.840	-	-	-	-	92,41%	0,00%	95.573.128	35.685.968
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	292.040.000	335.440.000	305.418.000	2.047.736.700	611.102.000	273.105.796	329.254.000	298.740.000	2.031.129.572	219.816.400	93,52%	98,16%	97,81%	99,19%	35,97%	718.347.340	630.409.154
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	217.040.000	260.440.000	286.018.000	403.661.000	405.667.000,00	204.360.000	257.415.000	280.040.000	401.593.450	165.243.600,00	94,16%	98,84%	97,91%	99,49%	40,73%	314.565.200	261.730.410
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	20.000.000	20.000.000	-	-	-	19.505.000	17.065.000	-	-		97,53%	85,33%	-	-	-	8.000.000	7.314.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	35.000.000	35.000.000	19.400.000	1.235.000.000	172.460.000,00	29.450.796	34.999.000	18.700.000	1.223.602.122	22.459.900,00	84,15%	100,00%	96,39%	99,08%	13,02%	299.372.000	265.842.364

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke					Rata Rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 per agustus	2021	2022	2023	2024	2025	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	20.000.000	20.000.000	-	409.075.700	32.975.000,00	19.790.000	19.775.000	-	405.934.000	32.112.900,00	98,95%	98,88%	#DIV/0!	99,23%	97,39%	96.410.140	95.522.380

Sumber : Disdamkar, 2025

2.1.4 Kelompok sasaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Perwujudan Pembangunan daerah Disdamkar adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dan merupakan penlayanan Urusan wajib dasar kepada Masyarakat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran sebagai bagian penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat yan merupakan perwujudan pencapaian sasaran pelayanan yang disesuaikan dengan potensi, Konsisi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah lingkup pelayanan urusan kebakaran yang mencakup pelayanan dasar pelindungan pelayanan Penecagahan pemadaman Kebakaran dan penyelamatatan evakuasi kebakaran dan non kebakaran, semua kegiatan tersebut dilaksanakan yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat terkait urusan sub kebakaran memiliki peran sentral dalam siklus perlindungan terhadap masyarakat sehingga pada prosesnya harus berjalan secara objektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu Pelayanan Pencegahan, pemadaman dan penyelamatan terhadap warga negara dari ancaman kebakaran (Disdamkar) memiliki peran sentral sebagai lembaga Pelayanan Terhadap Masyarakat secara langsung dalam urusan mendesak, potensial rawan kejadian kebakaran dan sehingga menjadi prioritas pelayanan dengan tuntutan perkembanganmasyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka SDM, Sarana dan Prasarana serta Norma Standar, Prosedur dan Metode (NSPM) harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang melayanai masyarakat dengan baik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdamkar Kabupaten Bandung, maka kelompok sasaran layanan Disdamkar terdiri dari berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan dan Pelayanan di Kabupaten Bandung. Pelayanan yang diberikan oleh Disdamkar berupa Pelayanan Pemadaman Kebakaran, Pencegahan dan system proteksi banguna Gedung dari bahaya kebakaran. Pengikatas partispasi masyarakat terhadap kejadian kebakaran, Penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan Non kebakaran serta penyediaan data dan informasi kejadian dan pencegahan kebakaran, fasilitasi musyawarah. Kelompok sasaran layanan Disdamkar Kabupaten Bandung adalah masyarakat umum.

2.1.5 Mitra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Pemberian Layanan

Mitra pelayanan Disdamkar Kabupaten Bandung adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan Disdamkar dalam melaksanakan pelayanan pemadaman, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dengan respon cepat kepada masyarakat. Mitra pelayanan ini terbagi kedalam beberapa kategori diantaranya:

1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Penyelamatan (PMI, Rumah sakit, Dishub, Polisi, Pol PP, BPBD, Basranas;
2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Legislatif) sebagai mitra dalam pembahasan dan pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memberikan aspirasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan;Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Teknis lainnya dalam hal memberikan arah kebijakan nasional, sinkronisasi program pusat-daerah, serta dukungan dana dan teknis;
3) Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai mitra yang terlibat langsung dalam parsitipasi masyarakat dalam pembetukan Relawan Kebakaran;
4) Sektor Swasta dan Dunia Usaha sebagai mitra dalam pencegahan dan penaggulangan kebakaran melalui kemitraan Kerjasama (MOU);Akademisi dan Peneliti sebagai mitra dalam menyediakan riset dan kajian ilmiah, data dan analisis sebagai dasar perencanaan pengembangan dan optimalisasi layanan ;
5) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Relawan kebakaran (REDKAR) berperan dalam advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta garda terdepan dalam pelayanan;
6) Masyarakat dan Kelompok Komunitas; berperan dalam sumber aspirasi dan partisipasi dalam penyusunan prioritas layanan dan pembangunan serta terlibat dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbang, Konsultasi Publik, dan survei kepuasan layanan.

2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan pemadaman kebakaran serta penyelamatan, diperlukan adanya sinergi yang tidak hanya terbatas pada lingkup internal wilayah Kabupaten Bandung, tetapi juga melibatkan daerah-daerah yang berbatasan langsung. Hal ini penting mengingat kejadian kebakaran dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak mengenal batas administratif suatu wilayah, sehingga membutuhkan upaya

terpadu lintas daerah agar penanganan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan efektif.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Garut. Kerjasama ini tidak hanya mencakup kegiatan pencegahan kebakaran, tetapi juga penanggulangan dan upaya penyelamatan apabila terjadi peristiwa kebakaran di wilayah perbatasan. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan pos-pos layanan terdekat dari lokasi kejadian, sehingga dapat memastikan waktu tanggap darurat (*response time*) yang singkat dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Landasan hukum kerjasama antardaerah ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, pelaksanaannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat saling membantu dalam urusan wajib, termasuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan dasar hukum tersebut, kerjasama ini memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dilaksanakan secara formal serta berkelanjutan.

Kerjasama ini dilaksanakan sepanjang waktu, tanpa dibatasi oleh periode tertentu, sehingga memastikan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi kebakaran di wilayah perbatasan. Melalui kolaborasi lintas daerah, diharapkan tercapai peningkatan efektivitas penanganan kebakaran, pengurangan risiko kerugian jiwa dan materi, serta terwujudnya rasa aman bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, kerjasama ini menjadi bentuk nyata solidaritas antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan tanggap di bidang kebakaran dan penyelamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permasalahan didefinsikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 merupakan dokumen yang mengatur pembangunan Indonesia selama 5 tahun mendatang. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJMN ini memiliki fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan tujuan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

1. Fokus dan Tujuan Utama RPJMN 2025-2029:

   a. Pembangunan yang Berkelanjutan

      RPJMN mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam pembangunan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan pengurangan emisikarbon.

   b. Asta Cita

      RPJMN mengimplementasikan Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, reformasi hukum, peningkatan ketahanan nasional, pemantapan stabilitas keamanan, dan peningkatan peran Indonesia di kancah internasional.

2. Implementasi RPJMN 2025-2029

   RPJMN 2025-2029 akan diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Beberapa program yang akan diimplementasikan antara lain

   a. Penguatan Infrastruktur

   Peningkatan infrastruktur, terutama di daerah terpencil dan wilayah perbatasan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. RPJMN 2025-2029 akan terus dievaluasi dan dipantaus ecara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Reviu Renstra Provinsi terkait dengan urusan Kebakaran di provinsi belum ada lembaga yang secara khusus menangani kebakaran tapi masih dibawah naungan BPBD atas dasar tersebut kita menelaah dengan renstra BPBD provinsi adalah proses evaluasi dan peninjauan kembali Rencana Strategis (Renstra) BNPB (Badan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam reviu Renstra BNPB dengan BPBD antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara BNPB dan BPBD sangat penting dalam penanggulangan bencana. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui rapat-rapat rutin dan komunikasi yang efektif.

2. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu diperhatikan dalam reviu Renstra BNPB dengan BPBD;
3. Renstra BNPB dan BPBD perlu selaras dengan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana nasional dan daerah;
4. Reviu Renstra BNPB dengan BPBD perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas penanggulangan bencana/kebakaran.

Tujuan reviu Renstra BNPB dengan BPBD adalah untuk :

1. Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana/kebakaran: Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, penanggulangan bencana/kebakaran dapat dilakukan dengan lebih efektif;
2. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan: Reviu Renstra BNPB dengan BPBD dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana/kebakaran.

Dalam melakukan reviu Renstra BNPB dengan BPBD, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti :

1. Analisis kebutuhan dan prioritas penanggulangan bencana/kebakaran perlu dilakukan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi;
2. Pengembangan rencana penanggulangan bencana/kebakaran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditentukan;
3. Evaluasi dan pemantauan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas penanggulangan bencana/kebakaran.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah ini disusun dengan melibatkan partisipasi publik dan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, hingga *top-down* dan *bottom-up*. Berikut beberapa aspek penting terkait RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029.

Visi dan Misi: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 memiliki visi "Bandung Lebih Bedas" yang berarti Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan. Visi ini dirancang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045". Dalam hal ini, Disdamkar Kabupaten Bandung berada dalam misi keempat yaitu "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi", dengan tujuan "Terwujudnya Wilayah Kabupaten Bandung Yang Tangguh Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat Yang Berkelanjutan Dan Kolaborasi Multipihak Secara Terpadu Untuk Penanggulangan Bencana", dengan indikator kinerja utama "Indeks Ketahanan Daerah,d engan sasaran "Meningkatnya kualitas layanan

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana". Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian utama dalam penyusunan RPJMD, RTRW dan KLHS. Dokumen yang ditetapkan diantaranya Kajian Risiko Bencana(KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana (RKPB), Rencana Kontinjensi (RENKON), Rencana Aksi dan Rencana Operasi.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Adapun keselarasannya bahwa rencana tata ruang wilayah harus menyesuaikan dengan dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Kebijakan Penataan Ruang kabupaten Bandung, meliputi pengembangan kawasan strategis sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dan terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang. Di dalam Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2021 dan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ditegaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak hanya berperan dalam pemadaman kebakaran, tetapi juga melaksanakan fungsi pencegahan, penyelamatan, pengendalian bahan berbahaya, serta penanggulangan keadaan darurat lain yang membahayakan masyarakat. Dalam konteks mitigasi bencana, Damkar Kabupaten Bandung memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis terhadap bangunan dan pemanfaatan ruang, memastikan ketersediaan sarana proteksi kebakaran dan jalur evakuasi, serta melakukan inspeksi keselamatan pada kawasan rawan bencana. Upaya ini sejalan dengan arahan tata ruang wilayah yang menekankan pengendalian pemanfaatan ruang, penetapan kawasan rawan bencana, dan penyediaan infrastruktur evakuasi, sehingga keberadaan Damkar dan Penyelamatan menjadi bagian penting dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bandung.

2.2.5 Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Disdamkar Daerah Kabupaten/Kota

KLHS merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai dampak lingkungan dari sebuah kebijakan, rencana, atau program, sekaligus memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis. Secara garis besar, KLHS berperan dalam menelaah potensi efek maupun risiko lingkungan, serta mendorong pencapaian tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain, KLHS berfungsi sebagai instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan aspek-aspek ekologis ke dalam proses pengambilan keputusan, sehingga prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dapat terjamin. Muatan KLHS meliputi kajian mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan, identifikasi dampak serta risiko lingkungan hidup, analisis kinerja ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, hingga ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Demi tercapainya pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan KLHS harus dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku :

1. Sesuai kebutuhan (*fit for the purpose*);
2. Berorientasi pada tujuan (*objective-led oriented*);
3. Didorong motif keberlanjutan (*sustainability-driven*);
4. Ruang lingkup komprehensif (*comprehensive scope*);
5. Relevan dengan pengambilan keputusan (*decision-relevant*);
6. Terpadu (*integrated*);
7. Transparan (*transparent*);
8. Patisipatif (*participative*);
9. Akuntabel (*accountable*);
10. Efektif dalam pembiayaan (*cost-effective*).

Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan RPJMD adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu Capaian Program TPB ruang (*self assessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permasalahan Utama urusan tarntibumlinmas sub urusan kebakaran ini adalah ketidakseimbangan antara sumber daya dengan luasnya layanan yang harus di layani, secara geografis, Kabupaten Bandung terletak pada 6049'- 70 18' Lintang Selatan dan 1070 14'- 1070 56' Bujur Timur dan berada di wilayah dataran tinggi. Sebagian besar bentang alam yang terdapat di Kabupaten Bandung berada di antara bukit- bukit dan gunung yang mengelilingi wilayahnya. Di sebelah utara Kabupaten Bandung terdapat Gunung Bukit Tunggul (2209 mdpl) dan Gunung Tangkuban Perahu (2087 mdpl) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Di bagian selatan, Kabupaten Bandung berbatasan dengan Gunung Patuha (2434 mdpl), Gunung Malabar (2343 mdpl), Gunung Guntur (2434 mdpl) dan Gunung Papandayan (2265 mdpl) yang berbatasan dengan Kabupaten Garut. Dari segi administratif, Kabupaten Bandung merupakan salah satu bagian wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan luas 174.084,34 Ha danberibukota di Kecamatan Soreang. Batas administrasi Kabupaten Bandung dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang
Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan. Adapun kecamatan serta luas wilayah administratif masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.11 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Pangalengan	21.656,39
2	Kecamatan Pasir Jambu	19.807,79
3	Kecamatan Rancabali	15.286,64
4	Kecamatan Kertasari	13.654,39
5	Kecamatan Pacet	9.482,01
6	Kecamatan Arjasari	6.277,55
7	Kecamatan Cimaung	5.955,56
8	Kecamatan Ciwidey	5.519,18
9	Kecamatan Ibun	5.477,22
10	Kecamatan Ciparay	5.366,72
11	Kecamatan Paseh	4.789,21
12	Kecamatan Cimenyan	4.758,98
13	Kecamatan Kutawaringin	4.705,50
14	Kecamatan Rancaekek	4.486,63
15	Kecamatan Cicalengka	4.351,07
16	Kecamatan Nagreg	4.282,97
17	Kecamatan Baleendah	4.182,97
18	Kecamatan Banjaran	3.903,25

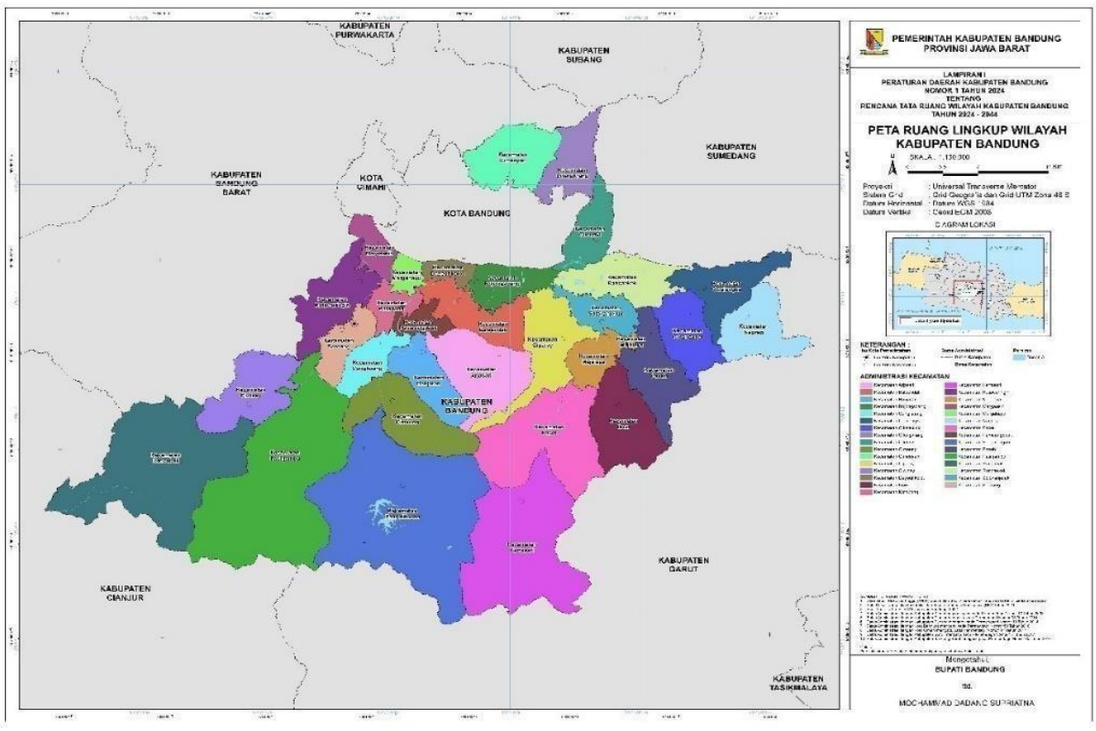
No	Kecamatan	Luas (Ha)
19	Kecamatan Cikancung	3.872,63
20	Kecamatan Cilengkrang	3.525,17
21	Kecamatan Cilenyi	3.063,24
22	Kecamatan Bojongsoang	2.822,38
23	Kecamatan Soreang	2.537,04
24	Kecamatan Solokanjeruk	2.435,27
25	Kecamatan Majalaya	2.431,45
26	Kecamatan Cangkuang	2.375,09
27	Kecamatan Margaasih	1.832,39
28	Kecamatan Katapang	1.561,94
29	Kecamatan Pamengpeuk	1.514,15
30	Kecamatan Dayeuh Kolot	1.115,30
31	Kecamatan Margahayu	1.054,26
	Total	174.084,34

Sumber : Data Lakip Disdamkar, 2024

Kabupaten Bandung merupakan wilayah terluas dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung atau Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018. Kawasan ini mencakup lima wilayah administratif, yaitu:

- Kabupaten Bandung (174.084 Ha),
- Kabupaten Bandung Barat (130.577,4 Ha),
- Sebagian wilayah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Jatinangor, Rancakalong, dan Pamulihan (15.486 Ha),
- Kota Cimahi (4.023 Ha), dan
- Kota Bandung (16.729 Ha).

Gambar 2.3 Peta Administratif Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2024-2025, Tahun 2024

Sebagai bagian integral dari PKN Bandung Raya, Kabupaten Bandung memiliki peranstrategis dalam pengembangan kawasan melalui sektor- sektor seperti industri non-polutif, agroindustri, pariwisata alam, pertanian, dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RTRWN (2017) serta RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. Perencanaan kawasan Cekungan Bandung juga menempatkan sektor industri pengolahan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan panas bumi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang terarah, Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah kawasan strategis berdasarkan skala pelayanannya. Kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berfungsi melayani aktivitas berskala internasional, nasional, atau antarprovinsi, mencakup koridor Soreang-Kutawaringin-Katapang-Margahayu-Margaasih, Cileunyi-Rancaekek, Cicalengka, Majalaya-Ciparay, Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, dan Banjaran. Sementara itu, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan direncanakan berada di Ciwidey dan Pangalengan, merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi strategis.

Selain itu, pengembangan pusat pelayanan lain juga diarahkan untuk memperkuat struktur wilayah. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai pusat kegiatan skala kecamatan ditetapkan di Cimenyan dan Cangkuang. Adapun Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang melayani skala antardesa meliputi wilayah Arjasari, Cikancung, Cimaung, Ibun, Kertasari, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Rancabali, dan Solokanjeruk. Pengembangan pusat-pusat ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan akses layanan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan kondisi ini bagi pelaksanaan pelayanan sub urusan kebakaran akan menjadi Masalah Pokok dalam menciptakan Mutu layanan Penggulangan pemadaman kebakan dan Penyelamatan Non kebakaran yang sesuai standar, kondisi saat ini masih di bawah standart pelayanan Minimal.

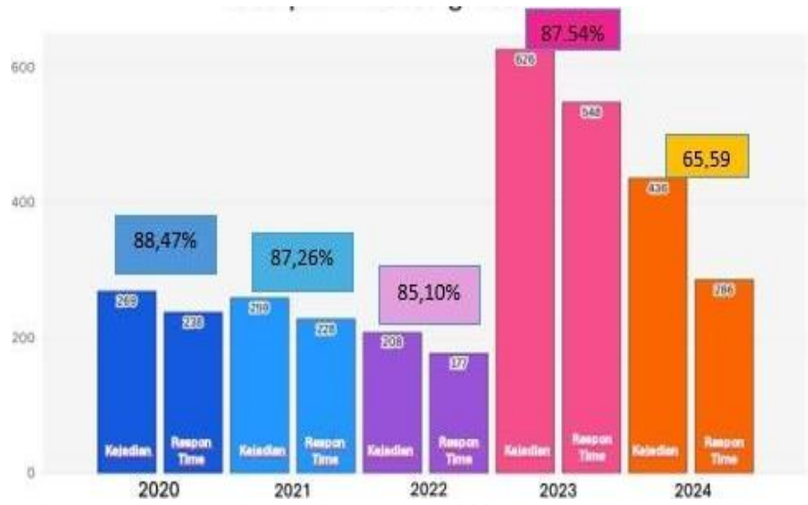
Kondisi layanan dalam Capaian *response time* tahun 2024 berdasarkan perhitungan Permendagri 114 tentang penersapan SPM sub urusan kebakaran *response time* oleh Pemadam (65,27%) ditambah capaian oleh redkar 100% maka 65,27% sehingga capaian rata rata sebesar 82,69%.. dengan penjelasan 'Tingkat respontime per Desember 2024 sebesar 82,69 % yaitu yang di capai oleh Petugas Pemdam sebesar 65,37 % dari 436 kejadian waktu yang ditempuh maksimal 15 menit sebanyak 285 Kejadian, sisanya 151 Kejadian masih diatas 15 menit, dan Oleh Redkar 100% yaitu dari 5 kejadian kebakaran yang ditangani oleh redkar seluruhnya dicapai dalam waktu kurang 15 Menit, dengan akar masalah Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas dan

kuantitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai.

1. *Response time* penggulangan kebakaran : adalah batasan waktu maksimal 15 menit untuk respon time, yaitu mulai dari waktu panggilan darurat diterima hingga tim pemadam kebakaran tiba dilokasi kejadian, yaitu 15 menit (sesuai dengan standar Penerapan SPM Permendagri 114 Tahun 2018).

Analisa terhadap capaian *response time* 15 menit dalam pelayanan pengagulangan kebakaran dalam periode 2020-2024 tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.4 Capaian Tingkat *Response time* Pelayanan kejadian Kebakaran di Kabupaten Bandung 2020-2024



Sumber : Laporan Kejadian Bidang Disdamkar, 2024

2. Masalah lain adalah dari Jumlah kejadian yang mengancam Korban Jiwa kibat Kebakaran dan non Kebakaran setiap tahunnya selalu meningkat, kondisi Penyelamatan korban manusia pada tahun 2024 dari 436 kejadian kebakaran melayani 4140 jiwa, selamat 4100 Jiwa Luka 39 Jiwa dan Meninggal 1 Jiwa tingkat penyelamatan 100% dan Penyelamatan jiwa dari Non kebakaran dari 1475 kejadian sebanyak 12.684 Jiwa, selamat 12317 Jiwa, Luka 358 Jiwa Meninggal 9 Jiwa artinya tingkat penyelamatan Jiwa 99,92%", dari target kinerja pada Indikator Sasaran kejadian pelayanan bencana kebakaran yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa tahun 2024 sebesar 98% Hal ini menggambarkan *trend* unsur penyelamatan non kebakaran (penyelamatan *rescue animal*, pohon tumbang, tanah longsor, kendaraan terprosok, dll) yang relatif meningkat dari tahun ketahun.

Gambar 2.5 Jumlah Penyelamatan Kebakaran di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024



Sumber : Laporan Kejadian Bidang Disdamkar, 2024

Tabel 2.12 Masalah Pokok akar Masalah Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Masalah Pokok	Data Pendukung Permasalahan	Akar Masalah
Mutu layanan Penggulangan pemadaman kebakan dan Penyelamatan Non kebakaran masih di bahwah standart pelayanan Minimal	Capaian respontime tahun 2024 berdasarkan perhitungan Permendagri 114 tentang penersapan SPM sub urusan kebakaran respontime oleh Pemadam (65,27%) ditambah Capaian oleh redkar 100% maka 65,27% sehingga capaian rata rata sebesar 82,69%.. dengan penjelasan 'Tingkat respontime per Desember 2024 sebasear 82,69 % yaitu yang di capai oleh Petugas Pemdam sebesar 65,37 % dari 436 kejadian waktu yang ditempuh maksimal 15 menit sebanyak 285 Kejadian, sisanya 151 Kejadian masih diatas 15 menit, dan Oleh Redkar 100% yaitu dari 5 kejadian kebakaran yang ditangani oleh redkar seluruhnya dicapai dalam waktu kurang 15 Menit	Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai
Kualitas layanan Pengagulangan Kebakaran dalam tanggap waktu 15 Menit (respontime) rata rata masih diatas 17 Menit (82%)	Mininimnya Jumlah Pos damkar baru memiliki 9 Pos Damkar dan belum sesuai kebutuhan Luas wilayah layanan manajemen kabakaran di Wilayah kabupaten Bandung dengan 31 Kecamatan 270 desa dan 10 kelurahan,	Belum memenuhi standar Pelayanan minimal sub Urusan Kebakaran bahwa minimal disetiap kecamatan terdapat 1 Pos Pemadam kebakaran dan penyelamatan
Jumlah Kerugian Harta Benda mayarakat akibat kebakaran Masih Tinggi yaitu rata - rata masih diatas 30%	Nilai aset (Harta benda) yang terselamatkan dalam Kejadian bencana kebakaran tahun 2024 dari 450 kejadian total asset yan terselamatkan sebesar 108.868.600.000 (73.27%) dan kerugian 39.710.225.000 (26,73%) dari total Asset 148.678.725.000 sehingga capainya hanya mencapai 84,22 % hcaian ini menurun jika di bandungkan dengan capaian tahun 2023 yaitu dari 651 Kejadian, persentase aset yang terselamatkan 80,39% yaitu Rp. 228.130.800.000 dari total Rp. 283.772.750.000 dari target 87 % terrealisasi 80,39 % d sehingga capaian prosentase Jumlah aset yang terelamatkan dalam kurun waktu tahun 2024 mengalami penurunan dampak dari capain respon time yang masih duiatas 15 menit	Mininimnya Jumlah Pos damkar baru memiliki 9 Pos Damkar dan belum sesuai kebutuhan Luas wilayah layanan man ajemen kabakaran di Wilayah kabupaten Bandung dengan 31 Kecamatan 270 desa dan 10 kelurahan,
Jumlah kejadian yang mengancam Korban Jiwa akibat Kebakaran dan Kebakaran setiap tahunnya selalu meningkat	Penyelamatan korban manusia dari 436 kejadian kebakaran melayani 4140 jiwa,selamat 4100 Jiwa Luka 39 Jiwa dan Meninggal 1 Jiwa tingkat penyelamatan 100% dan Penyelamatan jiwa dari Non kebakaran dari 1475 kejadian sebanyak 12.684 Jiwa, selamat 12317 Jiwa, Luka 358 Jiwa Meninggal 9 Jiwa artinya tingkat penyelamatan Jiwa 99,92%", dari target kinerja pada Indikator Sasaran kejadian pelayanan bencana kebakaran yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwatahun 2024 sbsesar 98 %	Jumlah kejadian yang mengancam Korban Jiwa akibat Kebakaran dan Kebakaran setiap tahunnya selalu meningkat
		Laporan Kejadian kebakaran sering telat disampaikan ke petugas pemadam kebakaran sehingga telat penanganan pemadaman sehingga berakibat fatal bagi masyarakat menimbulkan resiko kergian harta benda bahkan jiwa

Masalah Pokok	Data Pendukung Permasalahan	Akar Masalah
		Derajat pemahaman Masyarakat terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran yang masih rendah; System proteksi pencegahan dan pengendalian kebakaranBangunan Gedung/ Wilayah Pemukiman di kabupaten Bandung masih rendah

Sumber : LKIP Disdamkar, 2024

2.2.7 Isu Strategis

Merumuskan isu strategis daerah berangkat dari permasalahan, isustrtegis sesui lingkungan dinamis Isu global, Nasional dan regional dan potensi yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Gambar 2.6 Perumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2030



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-2029

Setelah melakukan analisis lingkungan langkah berikutnya adalah implementasi strategi dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan organisasi, maka membutuhkan sejumlah langkah tindakan atau langkah operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dari pencapaian durasi waktu dalam program jangka pendek dan jangka panjang. “Tujuan jangka pendek adalah hasil yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau kurang”. Sedarmayanti (2014:150). Sedangkan tujuan jangka panjang dimaksudkan sebagai implementasi strategi yang dilaksanakan secara konsisten, sebagaimana dikatakan sedarmayanti (2014:151) “ merepresentasikan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu”.

Sejauh mana dan sebagaimana efektivitas suatu strategi yang telah dipilih diimplementasikan akan tergantung pada bagaimana proses evaluasi dilaksanakan, sebagaimana menurut Siagian (2008 : 257) “Manajemen perlu melakukan tiga jenis tindakan, yaitu melakukan pengawasan, membuat

penilaian dan menciptakan suatu system umpan balik". Dengan demikian evaluasi akan dapat dengan mudah mengidentifikasi keberhasilan kinerja organisasi jika berangkat dari hasil kerja yang terukur dan dilaksanakan oleh organisasi, baik individu maupun tim.

Isu strategis dalam bidang pemadam kebakaran meliputi berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan kebakaran. Beberapa isu strategis yang sering muncul dalam pemadam kebakaran antara lain:

1. Sumber daya manusia: Isu ini berkaitan dengan peningkatan jumlah dan kualitas personil pemadam kebakaran. Diperlukan upaya dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan personil yang terlatih, berkompeten, dan memiliki kemampuan serta keahlian dalam penanggulangan kebakaran
2. Peralatan dan teknologi: Isu ini melibatkan pengadaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai, termasuk perlengkapan kebakaran, kendaraan pemadam kebakaran, peralatan komunikasi, serta teknologi pemadam kebakaran yang canggih. Peningkatan dan pengembangan teknologi kebakaran yang inovatif juga penting untuk meningkatkan efektivitas tindakan pemadam kebakaran.
3. Penanganan kebakaran perkotaan: Isu strategis ini terkait dengan penanggulangan kebakaran di area perkotaan yang kompleks, di mana bangunan padat dan akses yang terbatas dapat menyulitkan upaya pemadaman. Diperlukan perencanaan dan strategi khusus untuk penanganan kebakaran di area perkotaan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait, perencanaan evakuasi, dan penerapan teknologi pemadam kebakaran yang sesuai.
4. Pencegahan kebakaran: Isu ini melibatkan upaya pencegahan kebakaran melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran kebakaran, pengawasan dan penegakan peraturan keamanan kebakaran, inspeksi bangunan secara rutin, serta pengelolaan risiko kebakaran dalam perencanaan pembangunan.
5. Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga: Isu ini mencakup kerjasama dan koordinasi yang efektif antara dinas pemadam kebakaran dengan instansi terkait lainnya, seperti polisi, layanan kesehatan, penanggulangan bencana, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap kebakaran dan memastikan koordinasi yang lancar dalam penanganan darurat.
6. Riset dan inovasi: Isu ini melibatkan penelitian dan pengembangan dalam bidang pemadam kebakaran, termasuk pengembangan teknologi baru, peralatan pemadam kebakaran yang lebih efisien, dan

pemahaman yang lebih baik tentang perilaku kebakaran. Riset dan inovasi dapat membantu dalam meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pemadam kebakaran

Ke enam Isu tersebut berangkat dari diisu Global, Nasional dan Regional sehingga dapat terpetakan seperti dalam tabel Perumusan Teknik isu strategis dalam hal ini isu yang muncul masa lalu saat ini dan Kemungkinan masa yang akan datang, seperti dalam berikut:

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran	Mutu layanan Penggulangan pemadaman kebakan dan Penyelamatan Non kebakaran masih di bahwah standart pelayanan Minimal Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi,	Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu perhatian utama dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia. KLHS bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap karhutla, kebakaran di Pemukiman dan lingkungan industi	Kebakaran California: Kebakaran di Los Angeles pada Januari 2025 menyebabkan evakuasi 180.000 penduduk dan menyoroti dampak pemanasan global sebesar 1,5°C terhadap intensitas kebakaran. Kebakaran Jasper (Canada): Pada Juli 2024, kebakaran di Taman Nasional Jasper memaksa lebih dari 25.000 orang	Jumlah Kasus: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 629 kasus karhutla di Indonesia sepanjang tahun 2024, dengan peningkatan signifikan pada periode Juli hingga Oktober akibat musim kemarau yang ekstrem. Luas Area Terbakar: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa luas karhutla dari	Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, Jawa Barat menghadapi berbagai insiden kebakaran yang signifikan, mencakup kebakaran permukiman, lahan, dan hutan total Kejadian: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kabupaten Bandung mencatat 436	1. Sumber daya manusia: Isu ini berkaitan dengan peningkatan jumlah dan kualitas personel pemadam kebakaran. Diperlukan upaya dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan personel yang terlatih, berkompeten, dan memiliki kemampuan serta keahlian dalam penanggulangan kebakaran 2. Peralatan dan teknologi: Isu ini melibatkan pengadaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai, termasuk perlengkapan kebakaran, kendaraan pemadam kebakaran, peralatan komunikasi, serta teknologi pemadam kebakaran yang canggih. Peningkatan dan pengembangan teknologi kebakaran yang inovatif juga penting untuk meningkatkan efektivitas tindakan pemadam kebakaran. 3. Penanganan kebakaran perkotaan: Isu strategis ini terkait dengan penanggulangan kebakaran di area perkotaan yang kompleks, di mana bangunan padat dan akses yang terbatas dapat menyulitkan upaya pemadaman. Diperlukan perencanaan dan strategi khusus untuk penanganan kebakaran di area perkotaan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait, perencanaan evakuasi, dan penerapan teknologi pemadam kebakaran yang sesuai

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	SPM, dan sarana prasarana yang belum memadaI		mengungsi dan menghancurkan 358 bangunan	Januari hingga September 2024 mencapai 283.620,51 hektare, dengan dominasi pada lahan mineral sebesar 91,12%. Isu kebakaran dan penyelamatan di Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian, respons pemerintah, serta partisipasi masyarakat	kasus kebakaran sepanjang tahun 2024 di wilayah manajemen kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 651 kasus. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran.	4. Pencegahan kebakaran: Isu ini melibatkan upaya pencegahan kebakaran melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran kebakaran, pengawasan dan penegakan peraturan keamanan kebakaran, inspeksi bangunan secara rutin, serta pengelolaan risiko kebakaran dalam perencanaan pembangunan 5. Kolaborasi dan koordinasi antarlembaga: Isu ini mencakup kerjasama dan koordinasi yang efektif antara dinas pemadam kebakaran dengan instansi terkait lainnya, seperti polisi, layanan kesehatan, penanggulangan bencana, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap kebakaran dan memastikan koordinasi yang lancar dalam penanganan darurat.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah memperbarui pedoman manajemen kebakaran untuk membantu negara-negara menghadapi musim kebakaran yang semakin panas, kering, dan panjang. Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi pencegahan dan kesiapsiagaan dibandingkan respons reaktif	Isu kebakaran dan penyelamatan di Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian, respons pemerintah, serta partisipasi masyarakat	jenis Kebakaran: Mayoritas kebakaran terjadi di permukiman akibat korsleting listrik dan kelalaian penggunaan kompor gas. Selain itu, terdapat pula kebakaran lahan dan hutan, terutama selama musim kemarau	

Sumber : Kajian Renstra Disdamkar, 2025-2029

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

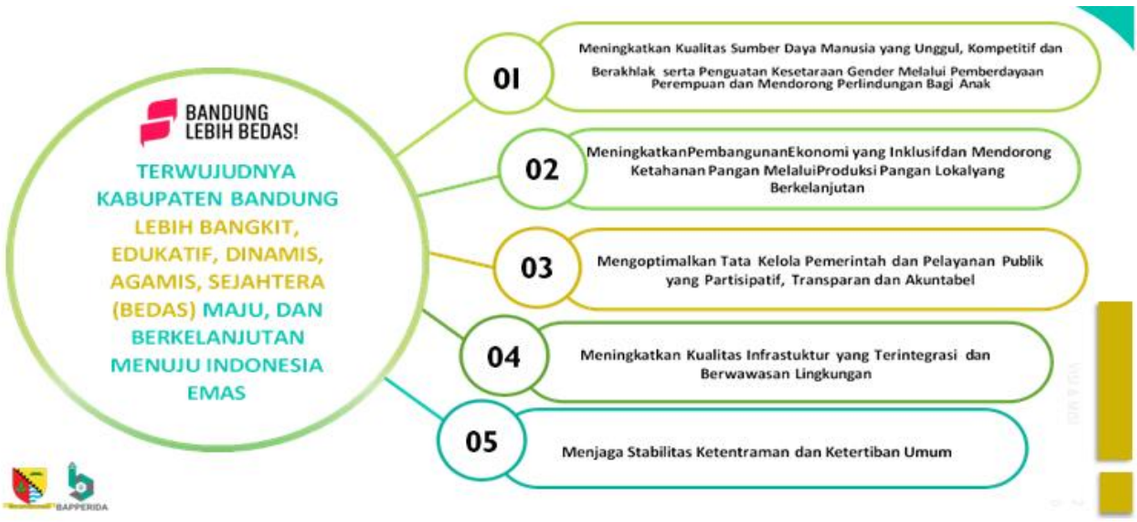
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Perumusan tujuan merupakan penjabaran dari perumusan misi akan menggambarkan berbagai aspek dari keberadaan organisasi yang penting secara komprehensif, sehingga pemahaman tentang apa yang diketahui tentang tujuan organisasinya dapat memberikan daya dorong untuk menunjukan kinerja secara maksimal. Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan lebih spesifik dan ditentukan proses waktu untuk pencapaiannya. Dengan demikian sasaran lebih mengikat dan mendorong kinerja lebih termotivasi kepada usaha pencapaian yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Visi Misi Bupati Bandung 2025-2029 diselaraskan dengan Tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dapat dirumuskan dalam Pohon kinerja adalah dapat diurai sebagai berikut:

Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD 2025-2029



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-2029

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban Umum sub urusan Kebakaran berdasarkan Perda Nomor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tipelogi A, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah

ditetapkan unit kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman, Bidang Penyelamatan, Bidang Sarana, Prasarana dan Informasi, sesuai dengan perubahan nomenklatur / Tipe Dinas tersebut Disdamkar ini memiliki tugas dan fungsi utamanya di dalam Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan salah satu program Pemerintah untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Pengangulangan kebakaran dan Non Kebabaran.

Perencanaan Kinerja adalah suatu perjanjian kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan dinas, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

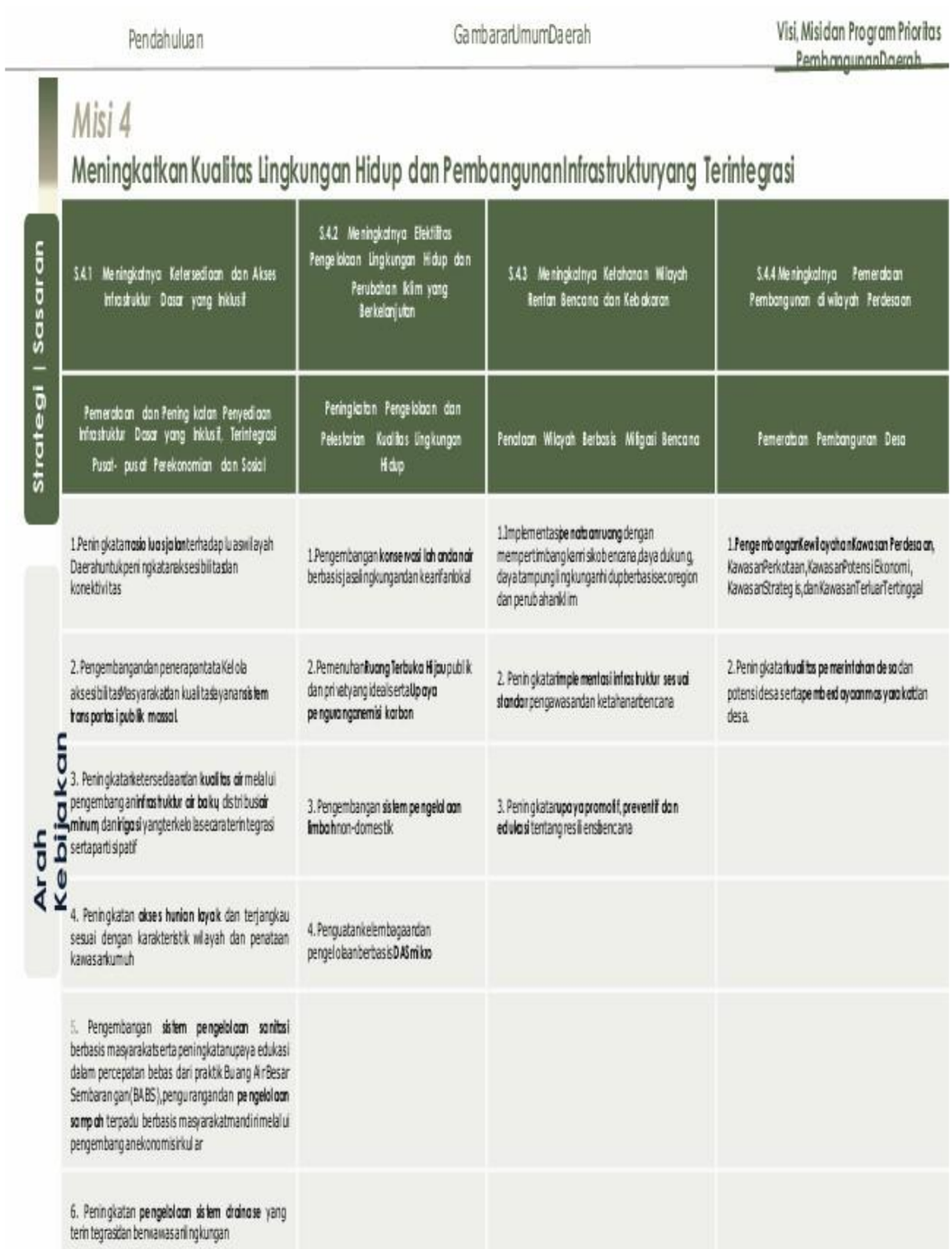
Aspek strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas dengan penjabarannya disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 11 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025- 2029 adalah sebagai berikut ini : Dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabuapten Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing masing misi yang diampu oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung diuraikan berdasarkan *cascading* mengemban misi sebagai berikut. yaitu “Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastuktur yang Terintegrasi Adapun tujuan Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan dan sasaran Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran dengan indikator Tingkat Kerawanan Kebakaran

Kaitan dengan misi 4 (empat) dengan strategi Penataan Wilayah Berbasis Mitigasi Bencana dan Kebakaran dengan arah kebijakan :

1. Penetapan zona khusus berdasarkan tingkat kerentanan bencana dan kebakaran, dengan pembatasan pembangunan di area rawan serta penerapan standar konstruksi tahan kebakaran

2. Penyediaan infrastruktur pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran.
3. Sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana dan kebakaran secara berkala untuk kesiapsiagaan warga

Gambar 3.2 Misi 4 RPJMD Kabupaten Bandung





Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-2030

Atas strategis dan arah kebijakan tersebut sasaran tujuan Perangkat Daerah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dirumuskan Terselenggaranya layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif, efisien, dan tepat waktu dalam merespons kejadian kebakaran dengan indikator Tujuan Perangkat daerah

1. Presentase jumlah aset/harta benda yang diselamatkan
2. Presentase jumlah korban jiwa yang diselamatkan

Gambar 3.3 Tema Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2030



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-2029

3.1.2 Sasaran

Dalam hal mewujudkan tujuan ditentukan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait pelayanan dasar kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran, Hal tersebut mengacu sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dengan dua sasaran strategis perangkat daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tanggap, efektif, dan sesuai dengan standar waktu tanggap (*response time*) yang ditetapkan Indikator sasaran :
    1. Waktu tanggap penanganan kebakaran (*Response Time*)
2. Meningkatnya pelayananan pencegahan dan pengendalian bahayakebakaran, dengan Indikator
    1. Presentase jumlah desa/kelurahan yang telah terbentuk relawan pemadam kebakaran
    2. Presentase jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bandung

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, program yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1– 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bandung.

Matrikulasi Misi Tujuan, Sasaran strategis indicator Kinerja peioden 5 tahun masa 2025-2029 terhadap Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dan sebagai dasar untuk, pelaksanaan misi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan, diuraikan berpedoman pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya ketahanan wilayah rentan bencana dan kebakaran	Terselenggaranya layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif, efisien, dan tepat waktu dalam merespons kejadian kebakaran		1. Presentase jumlah aset/harta benda yang diselamatkan		74%	75%	80%	85%	90%	95%	Jumlah aset yang diselamatkan atas kejadian kebakaran dibagi potensi aset yang akan terbakar
			2. Presentase jumlah korban jiwa yang diselamatkan		99%	99,94%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	Tingkat penyelamatan dan evakuasi atas kebakaran dan nonkebakaran yang menimbulkan korban jiwa
		Meningkatnya sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tanggap, efektif, dan sesuai dengan standar waktu tanggap (*response time*) yang ditetapkan	1. Presentase Waktu tanggap penanganan kebakaran (*Response Time*)	82,69%	83%	85%	87%	90%	95%	100%	Jumlah layanan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran dalam waktu tempuh 15 menit ditambah layanan oleh relawan kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran
		Meningkatnya pelayananan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.Presentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	31.43	37.14	52.86	68.57	84.29	100	100	Jumlah desa yang telah mempunyai relawan kebakaran dengan sistem informasi pencegahan penanggulangan kebakaran terhadap seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung
			2. Presentase Cakupan wilayah Managemen Kebakaran	29	37.70	38.70	48.38	58	67.74	77.41	Jumlah pos atau wilayah managemen kebakaran terhadap lusa wilayah kabupaten/kota atau jumlah kecamatan di kabupaten kota

Sumber : Disdamkar, 2025

3.2 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

Strategi renstra Disdamkar tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif dengan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Untuk itu diperlukan penahapan pembangunan guna memprioritaskan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan seperti tahapan rencana Perangkat daerah seperti dalam tabel berikut

Tabel 3.1 Penahapan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyebaran kuantitas/ Kualitas SDM (pasukan) dan Infrastruktur dalam Menunjang Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Peningkatan SDM dan Infrastuktur urusan kebakaran yang berkualitas dalam menunjang Pelayanan penanggulangan kebakaran	Peningkatan kompetensi SDM, insftruktur peeralatan dan perlengkapan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang lengkap untuk meningkatkan pelayanan dan Daya saing Daerah yang berkelanjutan	Pemantapan Pelayanan penanggulangan pencegahan Dan Penyeelamatan Dari Bahaya kebakaran yang berkelanjutan	Mewujudkan Ketentraman dan keteriban sub urusan kebakaran di kabupaten Bandung berkelanjutan

Sumber : Kajian Renstra Disdamkar, 2025-2029

Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran di aktulisasikan dengan program yang ada di Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai Inmendagri 2 Tahun 2025 dengan perubahanya yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan 5 Kegiatan dan beberapa sub kegiatan turunannya.

Dari uraian Keterkaitan berdasarkan hasil rumusan tersebut dapat di gambarkan keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD yang ditetapkan dalam Renstra Disdamkar Target dan indikator dapat digambarkan dalam *Cascading*/ tabel berikut :

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2030

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"								
Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target 2030
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan	Tingkat Kerawanan kebakaran	Terselenggarnya layanan pemadaman Kebakaran Penyelamatan yang efektif,	1.Presentase jumlah aset/harta benda yang diselamatkan	Meningkatnya sistem penanggulangan Gan Kebakaran dan Penyelamatan yang tanggap	1. Waktu tanggap penangan an kebakara n (*Response Time*) 2. Presentase jumlah desa	1).100 % 2).100.% 3).77,41%

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"								
Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target 2030
dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi	Terintegrasi ,Berketahanan dan Berkelanjutan	Kebakaran		efisien, dan tepat waktu dalam merespon kejadian kebakaran	2.Presentase jumlah korban jiwa yang diselamatkan	efektif, dan sesuai dengan standar waktu tanggap (*response time*) yang ditetapkan	/kelurahan yang telah terbentuk relawan pemadam kebakaran 3. Presentase jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bandung	
Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Kelembagaan Dalam Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meninkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas e Govermenn melalui peningkatan kulaitas kinerja aparatur, Tatakelola pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Managemen Risiko Perangkat Daerah	83 61

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-2029

3.3 Penyajian Lokus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan dibangun pos damkar minimal 50% dari total kecamatan atau 15 pos dengan kebijakan secara bertahap setiap tahun akan dibangun pos damkar beserta kelengkapan dan SDM nya. Jumlah rencana target penambahan dan pembangunan pos 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pos Podomoro di Kecamatan Bojongsoang
2. Pos Cilengkrang di Kecamatan Cilengkrang
3. Pos Pacet di Kecamatan Pacet
4. Pos Paseh di Kecamatan Paseh
5. Pos Kertasari di Kecamatan Kertasari
6. Pos Cimenyan di Kecamatan Cimenyan

Selain penambahan pos, rencana pengembangan juga mencakup pembangunan unit pos pemadam kebakaran yang representatif. Dari total 9 pos yang ada saat ini, baru 3 pos yang memiliki gedung sendiri dengan kondisi layak. Sementara itu, 6 pos lainnya masih menempati fasilitas kantor kecamatan sehingga belum sepenuhnya optimal sebagai kantor pos pemadam kebakaran diantaranya (Pos Pacira, Pos Cileunyi, Pos Baleendah, Pos Majalaya, Pos Ciparay, dan Pos Cicalengka).

Tabel 3.4 Penyajian Lokus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

N0	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4,830,029,950.00	3,293,557,000.00	6,793,557,000.00	6,793,557,000.00	6,793,557,000.00	Pos Podomoro di Kecamatan Bojongsoang Pos Cilengkrang di Kecamatan Cilengkrang Pos Pacet di Kecamatan Pacet Pos Paseh di Kecamatan Paseh Pos Kertasari di Kecamatan Kertasari Pos Cimenyan di Kecamatan Cimenyan

Sumber : Disdamkar, 2025

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan yang mengampu urusan tramtibumlinmas sub urusan kebakaran untuk kabupaten bandung melayani 31 kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan. berdasarkan wilayah pengembangan pelayanan wilayah managemen kebakaran (pos damkar) sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah daerah dari kondisi yang ada jumlah pos damkar yang harus dibangun 31 pos damkar akan tetapi kondisi saat ini baru eksisting 9 pos damkar sebagai berikut:

1. Pos Mako Soreang di Kecamatan Soreang
2. Pos Taman Kopo Indah di kecamatan Margaasih
3. Pos Pacira di Kecamatan Ciwidey
4. Pos Pangalengan di Kecamatan Pangalengan
5. Pos Ciparay di Kecamatan Ciparay
6. Pos Majalaya di Kecamatan Majalaya
7. Pos Baleendah di Kecamatan Baleendah
8. Pos Cicalengka di Kecamatan Cicalengka
9. Pos Cileunyi di Kecamatan Cileunyi

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan dibangun pos damkar minimal 50% dari total kecamatan atau 15 pos dengan kebijakan secara bertahap setiap tahun akan dibangun pos damkar beserta kelengkapan dan SDM nya. Jumlah rencana target penambahan dan pembangunan pos 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pos Podomoro di Kecamatan Bojongsoang
2. Pos Cilengkrang di Kecamatan Cilengkrang
3. Pos Pacet di Kecamatan Pacet
4. Pos Paseh di Kecamatan Paseh

5. Pos Kertasari di Kecamatan Kertasari
6. Pos Cimenyan di Kecamatan Cimenyan

Selain penambahan pos, rencana pengembangan juga mencakup pembangunan unit pos pemadam kebakaran yang representatif. Dari total 9 pos yang ada saat ini, baru 3 pos yang memiliki gedung sendiri dengan kondisi layak. Sementara itu, 6 pos lainnya masih menempati fasilitas kantor kecamatan sehingga belum sepenuhnya optimal sebagai kantor pos pemadam kebakaran diantaranya (Pos Pacira, Pos Cileunyi, Pos Baleendah, Pos Majalaya, Pos Ciparay, dan Pos Cicalengka)

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan akses hunian layak dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah melalui penyediaan hunian vertikal dan penataan Kawasan Kumuh 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat secara efektif dan berkeadilan	Terselenggaranya layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif, efisien, dan tepat waktu dalam merespons kejadian kebakaran, dengan sasaran Meningkatnya sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tanggap, efektif, dan sesuai dengan standar waktu tanggap (*response time*) yang ditetapkan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

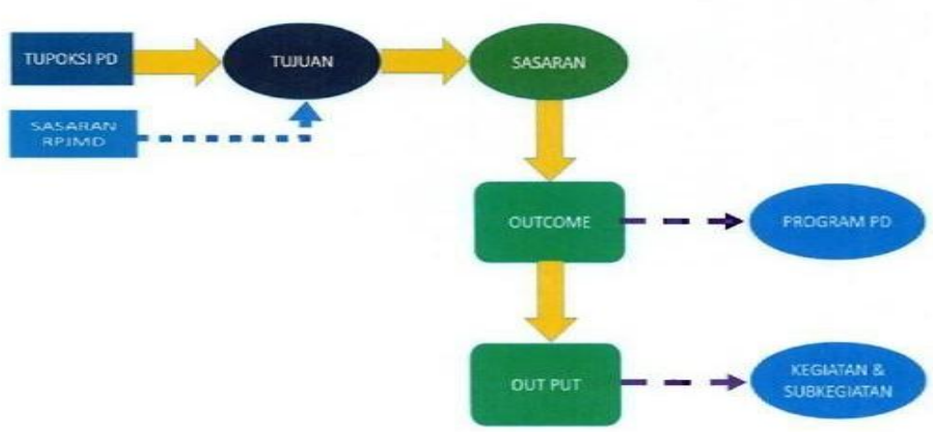
Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

4.1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dalam merumuskan program dan kegiatan, subkegiatan dan penyelenggaraan Bidang urusan dalam kerangka keterkaitan tugas dan fungsi dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan berpedoman pada Sasaran RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui program perangkat daerah yang di harapkan terealisasinya *outcome*, dan *output* yang ditargetkan melalui kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan pada periode 2025-2029. Seperti gambar perumusan berikut.

Gambar 4.10 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : RPJMD 2025-2030

Untuk menentukan program kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan, dalam mencapai Kinerja Perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari tahun 2025-2030 perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan Penyusunan Renja PD, untuk itu perlu ditetapkan kerangka Program kegiatan dan sub kegiatan, berdasarkan rumusan *Cascading* tersebut program dan kegiatan secara substansi sama tetapi penyajian program kegiatan Indikator dan Definisi operasional dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra 2025-2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya ketahanan wilayah rentan Bencana Dan Kebakaran	T1 Terselenggaranya layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif, efisien, dan tepat waktu dalam merespons kejadian kebakaran				T1.1 Presentase jumlah aset/harta benda yang diselamatkan T.1.2 presentase jumlah korban jiwa yang diselamatkan		T1.1 Jumlah aset yang diselamatkan atas kejadian kebakaran dibagi potensi aset yang akan terbakar T.1.2 Tingkat penyelamatan dan evakuasi atas kebakaran dan nonkebakaran yang menimbulkan korban jiwa
		S1.1 Meningkatnya sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tanggap, efektif, dan sesuai dengan standar waktu tanggap (*response time*) yang ditetapkan			S1.1 Waktu tanggap penanganan kebakaran (*Response Time*)		Jumlah layanan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran dalam waktu tempuh 15 menit ditambah layanan oleh relawan kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran
			Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Managemen Risiko	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Tersusunya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah
				Statistik Sektoral Daerah	Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Statistik Sektoral Daerah	Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Meningkatnya pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Kebutuhan Prasarana dan Sarana Terpenuhi	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan
				Tersedianya Barang cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Meningkatnya Kualitas Informasi dan Kehumasan	Persentase laporan penyediaan asa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
				Terlaksananya enyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Meningkatnya Kondisi Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Aset Barang Milik Daerah / Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik) x100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
			OC1.1.1 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (inmendagri 2 tahun 2025)		OC.1.1.1 Presentase Jumlah Korban Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dalam waktu 15 menit	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARANDAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Penanganan Pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) oleh petugasdamkar dan Redkarbinaan Damkar di bagi jumlah kejadian kali 100%
				OT.1.1.1.1 Terpenuhinya capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	OT.1.1.1.1 Presentase jumlah kasus kebakaran Di WMK dengan capaian respon time 15 Menit	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam kabupaten/kota	Jumlah Kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit
				Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumenNSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket danPemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kesiapsiagaan dan pengendalian penanganan kejadian kebakaran
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah penanganan penyelamatan dan evakuasi jiwa padakejadian kebakaran dan non kebakaran

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan PengendalianBahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian B3dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Jenis Sapras Urusan kebakaran yangterstandarisasi (SNI)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana danprasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang bersrtifikatpemadan kebakaran

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Pengelolaan Sistem Komunikasidan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa dan kelurahan Kabupaten Bandung yang memiliki sisem komunikasi & infomasi kebakarandan Penyelamatan (SKIK)/ Jumlah desa dan kelurahan
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,Penanggul ang an, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	Jumlah kerjasamaantar wilayah kabupaten/kota, dan Dunia Usaha
				OT.1.1.1.2 Terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	OC.1.1.2 Presentase Layanan Penyelamatan evakuasi Non Kebakaran	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	jumlah jiwa yangdiselamatkan dibagi jumlah potensi korban jiwa pada kondisiyang membahayakan manusia
				Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	OT.1.1.1.2 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan padaPeristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	jumlah penyelenggaraanoperasi penyelamatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sapras yang terstandarisasi untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana danPrasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah aparatur yang terampil/ahli/bersertifikat dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
		S1.2. Meningkatnya pelayananan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			S1.2.1 Presentase jumlah desa/kelurahan yang telah terbentuk relawan pemadam kebakaran		Jumlah desa yang terbentuk relawan kebakaran terhadap jumlah seluruh desa yang ada di kabupaten bandung

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					S1.2.2 Presentase jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bandung		Wilayah managemen kebakaran disetiap kecamatan terhadap total kecamatan yang ada di kabupaten bandung
			OC 2.1.1 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran (inmendagri 2 tahun 2025)		OC 2.1.1 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan Rawan Kebakaran.	Program 1.05.4.2.	Jumlah desa yang telah mempunyai relawan kebakaran dengan sistem informasi pencegahan penanggulangan kebakaran terhadap seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung
				OT.2.1.1 Terbentuknya Sistem Ketahan Kebakaran Lingkungan SKKL/Relawan Kebakaran yang terbentuk disetiap desa	OT.2.1.1 Jumlah SKKL (sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) yang terbentuk relawan kebakaran di tiap desa	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	jumlah desa/kelurahanyang terbentukSKKL (Sistem KetahananKebakaran Lingkungan) dibagi jumlah desa/kelurahan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah masyarakatyang mendapat sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran
				Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	jumlah desa/kelurahan yang terbentuk relawan pemadam kebakaran
				Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	jumlah dukungan sarpras untuk relawan pemadamkebakaran per desa/kelurahan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					OC 2.1.2 Prosentase sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung	Program 1.05.4.2.	Jumlah bangunan/gedung/lingkungan/wilayah yang sudah mempunyai sistem proteksi terhadap kebakaran di wilayah kabupaten bandung
				OT.2.1.1 Tersedianya data bangunan/gedung/li ngku ngan yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran	OT.2.1.1 Persentase bangunan/gedung/lingkun gan yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	jumlah bangunan/gedung /lingkungan yang memenuhi standarproteksi kebakaran dibagi Jumlah Bangunan /gedung /lingkungan yangharus memiliki sistem proteksi kebakaran x 100%
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling kungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan/gedung /lingkungan yangharus memiliki sistem proteksi Kebakaran
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling kungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah bangunan/gedung /lingkungan yang memenuhi standar proteksi kebakaran
				OT.2.1.2 Terlaksananya investigasi terhadap kejadian kebakaran yang dilakukan	OT.2.1.2 Prosentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran	jumlah bangunan/gedung /lingkungan yang memenuhi standar proteksi kebakaran
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadiankebakaran yang dilakukan investigasi

Sumber = Disdamkar, 2025

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengampu Program dan kegiatan yang menunjang capaian tujuan dan sasaran kinerja. Dalam melaksanakan tugas Urusan Wajib pelayanan Dasar dengan urusan pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah isu tersebut yang ada terkait penangan urusan kebakaran ada Beberapa inovasi dalam penanggulangan pemadaman dan pencegahan kebakaran yang dapat diterapkan khususnya di wilayah kabupaten atau daerah dengan karakteristik campuran antara urban dan rural seperti Kabupaten Bandung: yaitu Inovasi Pemadaman dan Pencegahan Kebakaran, dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dijalankan kedepan melaui inovasi sebagai berikut :

1. Sistem Deteksi Dini dan *Monitoring Digital* (*Early Warning System*)
   - Sensor IoT (*Internet of Things*) untuk mendeteksi suhu, asap, dan gas berbahaya di area rawan kebakaran (permukiman padat, pasar, kawasan industri, hutan).
   - Integrasi CCTV + AI untuk mendeteksi sumber api atau kebulan asap secara otomatis dan *real-time*.
   - *Dashboard* Komando Digital untuk memantau titik api dan merespons cepat melalui aplikasi atau pusat kontrol terpadu.
2. Aplikasi *Mobile* Laporan Kebakaran dan Edukasi
   - Aplikasi berbasis *Android/iOS* bagi masyarakat untuk:
     - Melaporkan kejadian kebakaran secara cepat dan akurat.
     - Mendapat edukasi interaktif mengenai pencegahan kebakaran di rumah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
     - Menerima notifikasi kondisi darurat atau kebakaran aktif di sekitar mereka.
3. Kendaraan dan Peralatan Tanggap Cepat Modern
   - Motor pemadam ringan untuk menjangkau gang sempit dan kawasan padat.
   - Drone pemantau kebakaran untuk area luas seperti hutan dan perkebunan.
4. *Fire extinguishing ball* otomatis (bola pemadam api) yang bisa ditempatkan di titik-titik rawan seperti dapur, gardu listrik, atau pasar tradisional. Program Desa/Kampung anggap Kebakaran relawan pemadam kebakaran
   - Pelatihan masyarakat sebagai responden pertama kebakaran.
   - Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap RT/RW dengan pelatihan penggunaan rutin.
   - Sistem alarm kebakaran sederhana di tempat tinggal padat atau permukiman semi permanen.

5. Pemanfaatan Data dan Analitik untuk Pencegahan

- Pemetaan wilayah rawan kebakaran berbasis data kejadian, cuaca, dan tata guna lahan.
- Analisis tren penyebab kebakaran untuk merancang kampanye edukasi yang lebih tepat sasaran.
- Integrasi dengan BPBD, PLN, dan PDAM untuk mitigasi risiko akibat korsleting dan kebocoran gas.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		32.119.168.405		24.257.087.950,00		22.720.615.000,00		26.220.615.000,00		26.220.615.000,00		26.220.615.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB) 2.Indeks Managemen Risiko Perangkat Daerah (MR)	18.213.241.782	79 57	19,427,058,000.00	80 58	19,427,058,000.00	81 59	19,427,058,000.00	82 60	19,427,058,000.00	83 61	19,427,058,000.00	S.4.3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71.323.594	82	154.760.000	83	154.760.00 0	84	154.760.000	85	154.760.000	86	154.760.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.940.194	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.383.400	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1	69.760.000,00	1	69.760.000,00	1	69.760.000,00	1	69.760.000,00	1	69.760.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	14.232.977.388	100%	15.946.958.000	100%	15.946.958.000	100%	15.946.958.000	100%	15.946.958.000	100%	15.946.958.000	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.212.977.388	912	15.926.958.000,00	912	15.926.958.000,00	912	15.926.958.000,00	912	15.926.958.000,00	912	15.926.958.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		10.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	-	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan adiminstrasi perkantoran	174.700.000	100 %	117.000.000,00	100 %-	117.000.000,00	100%	117.000.000,00	100 %-	117.000.000,00	100%-	117.000.000,00	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.000.000	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.000.000	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.700.000	180	75.000.000,00	180	75.000.000,00	180	75.000.000,00	180	75.000.000,00	180	75.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya - Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran -	3.482.698.900	100 %	2.903.850.000,00	100 %	2.903.850.000,00	100 %	2.903.850.000,00	100 %	2.903.850.000,00	100 %	2.903.850.000,00	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	12	1.700.000,00	12	1.700.000,00	12	1.700.000,00	12	1.700.000,00	12	1.700.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	130.000.000	12	148.000.000,00	12	148.000.000,00	12	148.000.000,00	12	148.000.000,00	12	148.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.350.698.900	12	2.754.150.000,00	12	2.754.150.000,00	12	2.754.150.000,00	12	2.754.150.000,00	12	2.754.150.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	251.541.900	100%-	304.490.000	100%	304.490.000	100%	304.490.000	100 %	304.490.000	100%	304.490.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	167.070.000	20	209.630.000,00	20	209.630.000,00	20	209.630.000,00	20	209.630.000,00	20	209.630.000,00	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	74.471.900	1	84.860.000,00	1	84.860.000,00	1	84.860.000,00	1	84.860.000,00	1	84.860.000,00	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1..1. Presentase Jumlah Korban Penyelamatan dalam dan Evakuasi Korban Kebakaran dalam waktu 15 menit. 1.2. Presentase Layanan Penyelamatan evakuasi Non Kebakaran 2..1 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan Rawan Kebakaran. 2.2. Prosentase sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung	13.905.926.623	1.1 85 % 1.2 99% 2.1 44 2.2 45%	4.830.029.950,00	1.1 87% 1.2 99% 2.1 44 2.2 50%	3.293.557.000,00	1.1 89% 1.2 99% 2.1 44 2.2 55%	6.793.557.000,00	1.1 91% 1.2 99% 2.1 44 2.2 60%	6.793.557.000,00	1.1 93 % 1.2 99% 2.1 44 2.2 65%	6.793.557.000,00	S.4.3
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah kasus kebakaran Di WMK dengan capaian respon time 15 Menit	9.887.679.377	85	3.011.339.500,00	90	2.478.057.000,00	92	5.978.057.000,00	94	5.978.057.000,00	96	5.978.057.000,00	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	130.150.000	2	57.400.000,00	2	47.400.000,00	2	47.400.000,00	2	47.400.000,00	2	47.400.000,00	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.306.720.000	12	1.342.360.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	12	0	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.309.600,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0	20	0	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dadn Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala(setiap tahun) berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	75.000.000,00	44	30.000.000,00	44	30.000.000,00	44	30.000.000,00	44	30.000.000,00	44	30.000.000,00	
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	jumlah dokumen kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8.341.885.000	5	1.541.579.500,00	6	1.650.657.000,00	6	5.150.657.000,00	6	5.150.657.000,00	6	5.150.657.000,00	
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	15.614.777	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran	84.835.172	50%	115.000.000,00	55 %	115.000.000,00	60%	115.000.000,00	65%	115.000.000,00	70%	115.000.000,00	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	33.065.172	1	50.0000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaiakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	51.770.000,00	1	65.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	-
Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pemeriksaan Penilaian dan Inpeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedudng/Lingkungan yang memenuhi kelaiakan standar sarana prasaran a proteksi kebakaran	-	1	0	1	39.000.000,00	1	39.000.000,00	1	39.000.000,00	1	39.000.000,00	
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi	28.190.000	45%	35.000.000	50 %	35.000.000	55%	35.000.000	60%	35.000.000	65%	35.000.000	-
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	28.190.000	12	35.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	-	12	0	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	-
Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	-	12	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Jumlah desa yang terbentuk Relawan Kebakaran	1.857.485.374	40	1.362.650.450,00	40	490.500.000,00	40	490.500.000,00	32	490.500.000,00	24	490.500.000,00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	984.757.014,00	2000	468.073.000,00	2000	150.000.000,00	2000	150.000.000,00	2000	150.000.000,00	2000	150.000.000,00	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan\ Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	679.650.000,00	40	447.835.900,00	40	140.500.000,00	40	140.500.000,00	32	140.500.000,00	24	140.500.000,00	
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	193.078.360,00	46	446.741.550,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	

Bidang Urusan Program/Outcame/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Prosentase pelayanan pencarian dan pertolongan penyelamatan korban jiwa kebakaran dan non kebakaran	2.047.736.700,00	99	306.040.000,00	99	175.000.000,00	99	175.000.000,00	99	175.000.000,00	99	175.000.000,00	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	403.661.000,00	12 Laporan	249.680.000,00	12	118.640.000,00	12	118.640.000,00	12	118.640.000,00	12	118.640.000,00	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	409.075.700,00	12 Laporan	26.360.000,00	12	26.360.000,00	12	26.360.000,00	12	26.360.000,00	12	26.360.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1.235.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
	TOTAL ANGGARAN	32.119.168.405,00		22.884.483.500,00		23.084.483.500,00		23.084.483.500,00		23.084.483.500,00		23.084.483.500,00	

Sumber : Disdamkar, 2025

Ket :

S.4.3 : Program yang mendukung sasaran KDH : Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran

4.2 Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah

Sub kegiatan sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar sub urusan kebakaran sesuai dengan kemendargri 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventariasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dijadikan program prioritas pembangunan Daerah dalam Penerapan Standar Minimal sub urusan Kebakaran sesuai dengan Peremnedagri 114 tahun 2018 tentang SPM sub urusan Kebakaran. Untuk sub kegiatan yang menduikung hal tersebut sebagai mana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04.1.01.0018-Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	PN 8
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	R 40
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	R 40

Sumber : Pemetaan Renaksi, Permendagri Nomor 10, 2025

Ket :

PN 8 = Subkegiatan Prioritas Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

R 40 = Penataan Pemukiman Kumuh (pemenuhan pilar 7 kumuh, damkar hadir untuk proteksi kebakaran berupa penyediaan hydrant (kering).Pompa portable. Non fisik : membentuk relawan kebakaran (prasarana SDM) di kawasan kumuh berbasis SK kumuh)

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dirumuskan Terselenggaranya layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif, efisien, dan tepat waktu dalam merespons kejadian kebakaran dengan indicator Tujuan Perangkat daerah

1) Presentase jumlah aset/harta benda yang diselamatkan
2) Presentase jumlah korban jiwa yang diselamatkan

Target Indikator Kinerja utama dari tujuan dalam periode 2025-2030 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Indikator Sasaran Program Perangkat Daerah	Satuan	Tahun Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase jumlah aset/harta benda yang diselamatkan	Prosentase	74,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95%	Jumlah aset yang diselamatkan atas kejadian kebakaran dibagi potensi aset yang akan terbakar
2	Presentase jumlah korban jiwa yang diselamatkan	Prosentase	99,00	99,94	99,95	99,95	99,95	99,95	Tingkat penyelamatan dan evakuasi atas kebakaran dan non kebakaran yang menimbulkan korban jiwa

Sumber : Disdamkar,2025

Tingkat Keberhasilan Penyelenggaraan layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif efesien dan tepat waktu dalam merespon kejadian kebakaran dinyatakan baik jika kedua Indikator Tujuan tersebut dapat tercapai, Penetapan target disesuaikan dengan data capaian tahun 2024 dan penetapan target tersubt berdasarkan sumber daya yang ada, SDM, Sarana prasarana yang dimiliki dan anggran yang ada

Hal tersebut mengacu sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dengan Sasaran Strategis Perangkat daerah :

1. Indikator sasaran “Meningkatnya sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tanggap, efektif, dan sesuai dengan standar waktu tanggap (*response time*) yang ditetapkan adalah. Waktu tanggap penanganan kebakaran (*Response Time*), Indikator :

   1) Waktu tanggap penanganan kebakaran (*Response Time*)

2. sasaran “Meningkatnya pelayananan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dengan Indikator “

   1) Presentase jumlah desa/kelurahan yang telah terbentuk

relawan pemadam kebakaran

2) Presentase jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bandung

4.4 Target Penyelenggraan Kinerja Urusan pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam Pelaksanaan mewujudkan tujuan dan sasaran dan untuk mengatasi masalah isu tersebut yang ada terkait penangan urusan kebakaran ada beberapa inovasi dalam penanggulangan pemadaman dan pencegahan kebakaran yang dapat diterapkan khususnya di wilayah kabupaten atau daerah dengan karakteristik campuran antara urban dan rural seperti Kabupaten Bandung: yaitu Inovasi Pemadaman dan Pencegahan Kebakaran, dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Kinerja Kunci atas program tersebut ditargetkan dalam periode 2025-2030 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Sasaran Program Perangkat Daerah	Satuan	Tahun Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Presentase jumlah aset/harta benda yang diselamatkan	Prosentase	74,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95%	Jumlah aset yang diselamatkan atas kejadian kebakaran dibagi potensi aset yang akan terbakar
2	Presentase jumlah korban jiwa yang diselamatkan	Prosentase	99,00	99,94	99,95	99,95	99,95	99,95	Tingkat penyelamatan dan evakuasi atas kebakaran dan non kebakaran yang menimbulkan korban jiwa

Sumber : Disdamkar, 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025-2029

Tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sub-urusan kebakaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 adalah memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bagi seluruh warga masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah penduduk yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi kebakaran, dengan target capaian sebesar 100%. Target tersebut direncanakan untuk dicapai secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagaimana ditetapkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Indikator dan Target Penerapan SPM 2025-2029

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Penerima Layanan Dasar													
		Indikator	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang/ Warga Negara	3,633,437	200	3,633,437	200	3,633,437	200	3,633,437	200	3,633,437	200	3,633,437	200

Sumber : Disdamkar, 2025

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam mendukung tema pengembangan kawasan ibukota Kabupaten Bandung dalam kerangka pembangunan tematik “Gunungan”, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Saat ini, pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kawasan ibukota masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi ketersediaan pos damkar, kecepatan respons, maupun perlindungan terhadap bangunan publik dan fasilitas umum. Selain itu, masih terbatasnya keterlibatan masyarakat serta minimnya relawan kebakaran menyebabkan potensi risiko terhadap korban jiwa dan kerugian harta benda tetap tinggi, terutama di wilayah padat penduduk dan pusat aktivitas pemerintahan serta ekonomi. Gunungan memiliki makna filosofis dan religius yang merepresentasikan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia di dalamnya. Sebagai simbol keseimbangan dan harmoni, gunungan dimaknai sebagai kerangka konseptual dalam merancang pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan

Konsep “Gunungan” tersebut kemudian diturunkan dalam sejumlah aksi tematik pembangunan, yaitu:

a) Peningkatan ketahanan pangan;
b) Pengembangan kawasan ekonomi terpadu;
c) Pengembangan kawasan ibukota Kabupaten Bandung;
d) Peningkatan kualitas SDM yang Lebih Bedas; serta
e) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

1. Pengembangan Kawasan Ibukota Kabupaten Bandung

Dalam mendukung pengembangan kawasan ibukota Kabupaten Bandung, Disdamkar berperan untuk memastikan perlindungan masyarakat, aset publik, dan aktivitas sosial ekonomi melalui sistem penanggulangan kebakaran yang responsif dan terintegrasi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pos damkar, kecepatan respon yang belum merata, serta belum optimalnya perlindungan terhadap bangunan publik dan fasilitas umum di wilayah pusat pemerintahan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kawasan ibukota yang aman, tangguh, representatif, dan berkelanjutan melalui perlindungan optimal terhadap masyarakat dan aset vital. *Critical success factor* (CSF) yang diperlukan meliputi pemenuhan sistem proteksi kebakaran di gedung pemerintahan dan fasilitas publik, ketersediaan sarana prasarana yang memadai, penguatan SDM, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan.

Untuk mencapai hal tersebut, kondisi yang harus dipenuhi antara lain adanya dukungan anggaran, regulasi perlindungan kebakaran, tata kelola

yang responsif, serta koordinasi lintas sektor seperti BPBD, PUPR, kecamatan, dan dunia usaha. Program yang dijalankan Disdamkar dalam konteks ini mencakup Peningkatan Sistem Proteksi dan Keamanan Ibu Kota terhadap Bahaya Kebakaran dan Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Implementasinya dilakukan melalui audit proteksi kebakaran, pemasangan APAR dan hidran, sertifikasi proteksi, simulasi evakuasi, hingga pembentukan relawan kebakaran.

2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu

Disdamkar menghadapi tantangan berupa keterbatasan pos damkar dan lambatnya respon kebakaran di area industri dan niaga yang berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha dan iklim investasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya keamanan investasi dan kontinuitas ekonomi melalui respon kebakaran yang cepat dan perlindungan aset usaha.

Faktor kunci keberhasilan untuk tematik ini adalah pengembangan dan optimalisasi jaringan pos pemadam kebakaran, penambahan armada, peralatan, dan personel, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem kesiapsiagaan kebakaran. Kondisi yang diperlukan meliputi tersedianya lahan dan anggaran untuk pembangunan pos damkar, mobil pemadam, sarana proteksi, serta dukungan kebijakan lintas sektor dan dunia usaha.

Program yang relevan adalah Pengembangan Jaringan Pos Damkar serta Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Aktivitas yang dapat diakomodasi dalam periode 2026-2030 mencakup pemetaan titik rawan kebakaran di kawasan industri, pembangunan pos damkar prioritas, penambahan armada dan peralatan, serta peningkatan kapasitas personel penyelamatan dan pemadaman

Melalui pendekatan ini, kontribusi Disdamkar diharapkan mampu memperkuat ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan citra ibukota Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan tematik berbasis konsep Gunungan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah pembangunan, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta kebutuhan pendanaan indikatif untuk periode 2025–2029. Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam memperkuat peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan perlindungan kepada masyarakat dari potensi kebakaran maupun kedaruratan lainnya. Pelaksanaan Renstra 2025–2029 membutuhkan dukungan kepemimpinan, kerjasama lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam konteks mendukung tematik kepala daerah, dukungan Disdamkar terhadap pengembangan kawasan ibukota Kabupaten Bandung diwujudkan melalui peningkatan layanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta non-kebakaran, pembangunan pos-pos damkar di kecamatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui relawan kebakaran. Upaya ini bertujuan menekan risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda, sekaligus menciptakan ruang publik yang aman, inklusif, dan representatif sesuai konsep pembangunan tematik, sehingga memperkuat ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam penyusunannya meliputi:

a. Keterpaduan

   Renstra disusun secara sinkron dengan RPJMD serta dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya, sehingga setiap program dan kegiatan saling mendukung pencapaian arah pembangunan daerah.

b. Partisipatif

   Proses penyusunan melibatkan aparatur, masyarakat, mitra kerja, hingga unsur relawan kebakaran. Partisipasi ini diharapkan menghasilkan usulan dan masukan yang dapat memperkaya kualitas dokumen Renstra.

c. Transparansi

Tahapan penyusunan dilaksanakan secara terbuka sehingga publik dapat mengakses informasi, sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Berbasis Data Program dan kegiatan disusun berdasarkan analisis kebutuhan serta data kejadian kebakaran, penyelamatan, dan potensi kerawanan yang terukur, sehingga kebijakan yang ditetapkan lebih tepat sasaran.

d. Kesesuaian Regulasi

Seluruh rumusan Renstra mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

e. Fleksibilitas

Renstra disusun dengan memperhatikan dinamika perkembangan wilayah, sosial-ekonomi, maupun faktor eksternal seperti perubahan iklim, sehingga dapat menyesuaikan strategi apabila terjadi perubahan kondisi di lapangan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang ditetapkan. Mekanisme yang dijalankan mencakup:

a. Pengendalian

- *Monitoring* pelaksanaan kegiatan secara triwulanan atau semesteran;
- Identifikasi hambatan, kendala, serta risiko yang muncul untuk segera dilakukan langkah perbaikan;
- Menjamin keterpaduan dan koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Evaluasi

- Dilaksanakan setiap akhir tahun dan di penghujung periode Renstra;
- Pengukuran terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengetahui tingkat pencapaian target;
- Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan program, kegiatan, dan kebijakan pada periode selanjutnya.

Dengan adanya sistem pengendalian dan evaluasi yang konsisten, diharapkan target kinerja Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dapat direalisasikan dengan baik, sehingga peran dinas dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran maupun keadaan darurat dapat semakin optimal, sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Soreang, September 2025

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

IMAN IRIANTO

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 21
Tabel 2.2 Daftar Inventaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 22
Tabel 2.3 Daftar Inventaris Kendaraan 23
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 24
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung 27
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2021-2025 47
Tabel 2.7 Target Pemenuhan Penerapan SPM Sub Urusan kebakaran Tahun 2025-2029 54
Tabel 2.8 Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024 32
Tabel 2.9 Jenis Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Bandung 38
Tabel 2.10 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bandung 61
Tabel 2.11 Masalah Pokok akar Masalah Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran 65
Tabel 2.12 Rekomendasi Perbaikan Untuk Pelaksanaan SPM Tahun 2025-2030 39
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 69
Tabel 3.1 Penahapan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 78
Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PD dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2030 78
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 77
Tabel 3.3 Penyajian Lokus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 80
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 81
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra 2025-2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 83
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 95
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 106
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 107
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 108
Tabel 4.6 Indikator dan Target Penerapan SPM 2025-2029 109

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 18
Gambar 2.2 Lokasi Pos/Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) 25
Gambar 2.3 Peta Administratif Kabupaten Bandung 62
Gambar 2.4 Capaian Tingkat Response time Pelayanan kejadian Kebakaran di Kabupaten Bandung 2020-2024 64
Gambar 2.5 Jumlah Penyelamatan Kebakaran di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 65
Gambar 2.6 Perumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 66
Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMP 2025-2030 72
Gambar 3.2 Misi 4 RPJMD 74
Gambar 3.3 Tema Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2030 75
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 82